

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN**
**(Survey Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone Bolango)**

O L E H :

SAHRIN WADIPOLAPA

E.11.16.054

S K R I P S I



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN
(Survey Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone Bolango)

O L E H :

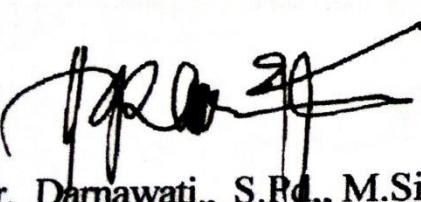
SAHRIN WADIPOLAPA
E.11.16.054

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar dan Sarjana dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 20 Juli 2020

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Darnawati., S.Pd., M.Si
NIDN. 09 140279 02

Pembimbing II


Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak
NIDN. 0907039101

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN (Survey Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango)

Oleh

SAHRIN WADIPOLAPA
E11.16.054

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Senin, 27 Juli 2020

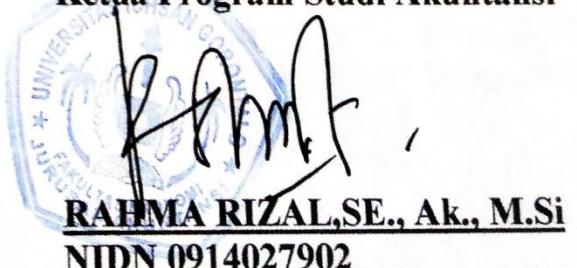
Komisi Penguji :

1. Dr. Arifin, SE.,M.Si
2. Rusdi Abdul Karim, SE.,M.Ak
3. Melinda Ibrahim, SE.,MSA
4. Dr. Darnawati, S.Pd.,M.Si
5. Marina Paramitha Sari Piola, SE.,M.Ak

Mengetahui



Ketua Program Studi Akuntansi



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 11.JULI....2020

Yang Membuat Pernyataan



Sahrin Wadipolapa

E.11,16.054

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tidak ada yang sulit bagi Allah. Segalanya mudah bagi-Nya. Ketika dia berkehendak atas sesuatu, cukuplah bagi-Nya mengatakan “Kun Fayakun” (Jadilah, maka terjadi). Al-Qur'an menerangkan, “Sesungguhnya keadaannya-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya ”Jadilah! Maka Terjadilah”.

(QS. Yasin [36]:82)

Tida ada orang sukses tanpa kegagalan. Ada yang gagal sekali, dua kali, bahkan sampai puluhan kali. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kita harus menghadapi kegagalan tersebut dengan sikap optimis. Habiskan jatah gagalmu, teruslah berusaha, jangan mudah menyerah. Jadikan kegagalan sebagai motivasi untuk terus maju. Dan jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur apa yang ada.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai darma baktiku kepada

kedua orang tua tercinta:

(Bapak Arno Wadipolapa dan Ibu Samrana Danunu)

Terima kasih atas segala yang telah kalian lakukan terhadapku, semoga dengan Toga ini mampu membersit sedikit kebahagiaan di wajah kalian, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang kalian.

Terim kasih kepada kakak-kakak saya yang selama ini sudah mendukung hingga sampai saat ini.

Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Ichsan Gorontalo dan terkhususnya kepada Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi atas semua bimbingannya.

**TERIMA KASIH UNTUK ALMAMATERKU TERCINTA UNIVERSITAS
ICHSAN GORONTALO**

2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta anugerah-Nya penulis dapat menyusun dan meyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan”**. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan tanpa bantuan dari berbagai pihak, ini tidak dapat diselesaikan. Namun apabila dalam penulisan ini masih ada kesalahan, dengan kerendahan hati penulis menerima dan mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dan memohon maaf sebesar-besarnya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Muh. Ichsan Gaffar, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan S, Psi, SE, MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal, SE, AK, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Darnawati, M.Si Selaku Pembimbing I, Ibu Marina paramitha Sari Piola, SE., M.Ak Selaku Pembimbing II, serta kedua orang tuaku yang paling aku sayang yang telah memberikan Doa, dorongan, motivasi, dan bimbingan hingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama ini insha Allah akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT Aamiin...

Gorontalo 2020

Sahrin Wadipolapa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi : Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4) dan Pemantauan (X5) secara parsial dan simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode survey. Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4) dan Pemantauan (X5) secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor BKPD Kabupaten Bone Bolangosebesar 96,40%, dan sisanya 3,60% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti namun turut berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Sub variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4) dan Pemantauan (X5) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) masing-masing sebesar 21,70%, 15,10%, 40,40%, 25,80%, 15,30% dengan demikian hipotesis kedua, ketiga, kempat, kelima dan keenam yang diajukan di terima.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze how much influence the Government Internal Control System (SPIP) includes: Control Environment (X1), Risk Assessment (X2), Control Activities (X3), Information and Communication (X4) and Monitoring (X5) partially and simultaneously on the Quality of Financial Statements (Y) at the Regional Finance and Revenue Agency Office of Bone Bolango Regency. This type of research is quantitative research, using a survey method. Methods of data analysis in this study using path analysis. Based on the results of the analysis and hypothesis testing carried out, it can be concluded that the Government Internal Control System (SPIP) which consists of the Control Environment (X1), Risk Assessment (X2), Control Activities (X3), Information and Communication (X4) and Monitoring (X5).) simultaneously has a positive and significant effect on the Quality of Financial Statements at the BKPD Office of Bone Bolango Regency of 96.40%, and the remaining 3.60% is influenced by other variables outside the model that are not studied but also have an effect on the quality of financial statements (Y). Based on these results, the first hypothesis in this study is accepted.

Controlling Environment (X1), Risk Assessment (X2), Control Activities (X3), Information and Communication (X4) and Monitoring (X5) sub-variables partially have a positive and significant effect on the Quality of Financial Statements (Y), respectively 21, 70%, 15.10%, 40.40%, 25.80%, 15.30%, thus the second, third, fourth, fifth and sixth hypotheses submitted are accepted.

Keywords: *Government Internal Control System, Quality of Financial Statements*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	Ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	Vi
ABSTRAK.....	Viii
ABSTRACT.....	vix
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	Xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS	
2.1 Kajian Pustaka	14
2.1.1 Pengendalian Intern	15
2.1.1.1 Definisi Pengendalian Interj.....	15
2.1.1.2 Unsur-unsur Pengendalian Intern.....	16
2.1.1.3 Tujuan Pengendalian Intern	17
2.1.2 SPI dan Laporan Keuangan Pemerintah	18
2.1.3 Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP	20
2.1.4 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan SPIP	21
2.1.5 PP No 60 Tahun 2008 Tentang SPIP	23
2.1.6 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	24
2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	36
2.1.7.1 Karakteristik Kualitatif Kualitas Laporan Keuangan.....	36
2.1.7.2 Peranan Pelaporan Keuangan.....	40

2.1.7.3 Tujuan Pelaporan Keuangan	40
2.1.8 Komponen Laporan Keuangan	41
2.1.9 Penelitian Terdahulu.....	47
2.2 Kerangka Pemikiran	48
2.3 Hipotesis	50
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian.....	51
3.2 Metode Penelitian	51
3.2.1 Metode Yang Digunakan.....	51
3.2.2 Operasional Variabel	52
3.2.3 Populasi dan Sampel.....	55
3.2.4 Jenis Dan Sumber Data.....	57
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data	58
3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian	59
3.2.7 Konversi Data	60
3.2.8 Teknik Analisis Data	61
3.2.9 Pengujian Hipotesis	62
BAB IV GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN	
DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian.	63
4.1.2 Visi Dan Misi	64
4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	64
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	73
4.2.1 Gambaran Umum Responden.	73
4.2.2 Karakteristik Variabel Penelitian	74
4.2.3 Hasil Uji Validitas.	83
4.2.4 Hasil Uji Reliabilitas.	88
4.2.5 Analisis Data Statistik	89
4.2.6 Pengujian Hipotesis.....	93
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	97
4.3.1SPIP Secara Simultan Berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	97

4.3.2 Lingkungan Pengendalian (X1) Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap KualitasLaporanKeuanga	98
4.3.3 Penilaian Risiko (X2) Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap KualitasLaporanKeuangan.....	100
4.3.4 Kegiatan Pengendalian (X3) Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap KualitasLaporanKeuangan	102
4.3.5 Informasi Dan Komunikasi (X4) Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap KualitasLaporanKeuangan.....	103
4.3.6 Pemantauan(X5)BerpengaruhPositifdanSignifikan Terhadap KualitasLaporanKeuangan.....	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	108
DAFTARPUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel2-1	:PenelitianTerdahulu	28
Tabel3-1	: Operasional Variabel IndependendanDependen.....	33
Tabel3-2	: DaftarPilihanKuesioner	35
Tabel3-3	: JumlahSampelPenelitian	36
Tabel3-4	:KoefisienKorelasi	40
Tabel4-1	: Skala PenelitianJawabanResponden	57
Tabel4-2	:NilaiSkorSubVariabelPelatihan (X1)	58
Tabel4-3	:NilaiSkorSubVariabelKejelasan Tujuan (X2)	59
Tabel4-4	:NilaiSkorSubVariabelDukunganAtasan(X3)	60
Tabel4-5	:NilaiSkorVariabelSistemAkuntansiKeuanganDaerah(Y)	61
Tabel4-6	: Uji Validitas VariabelPelatihan (X1).....	63
Tabel4-7	: Uji Validitas Variabel KejelasanTujuan (X2).....	63
Tabel4-8	: Uji Validitas Variabel DukunganAtasan(X3)	64
Tabel4-9	: Uji Validitas Variabel Sistem Akuntansi KeuanganDaerah(Y)	64
Tabel 4-10	: Uji Reliabilitas Variabel Bebas danVariabelTerikat	66
Tabel 4-11	: Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung danKontribusiSimultan.....	70
Tabel 4-12	: HasilPengujian Hipotesis	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 :KerangkaPemikiran	30
Gamber 3-1 : StrukturAnalisisJalur	43
Gambar 4.1 : HasilAnalisisJalur	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuisioner Penelitian.....	112
Lampiran 2 : Hasil Output SPSS.....	116
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Lokasi Penelitian.....	117
Lampiran 4 : Surat Keterangan Talah Melakukan Penelitian.....	118
Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiat.....	119
Lampiran 6 : Hasil Turnitin.....	120
Lampiran 7 : Riwayat Hidup Penulis.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai kasus korupsi yang terjadi di negara ini mengharuskan pemerintah untuk terus melakukan evaluasi serta pembenahan sistem administrasi tata kelola pemerintahan yang baik di semua sector guna memperoleh kepercayaan masyarakat sekaligus dapat mencapai tujuan pemerintahan daerah yang baik (*good government governance*) dalam hal ini mencakup 11 prinsip yakni Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*), bertanggung-jawab melaksanakan (*responsible*), responsif (*responsive*), bertanggung-gugat (*accountable*), adil (*fair*), partisipatif (*participative*), bebas korupsi (*anti corruption*), efisien dan efektif (*efficient and effective*), kepastian dan supremasi hukum (*rule of law*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan inovasi serta kesediaan untuk berubah lebih baik (*innovation and openness to change*).

Sistem tata kelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah selaku organisasi sector public berkewajiban untuk melakukan pelayanan public dengan perwujudan dan pertanggung jawaban kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan dengan pelaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis efektif dan transparan (Hariyanto, 2012) maka dari itu sangatlah penting adanya untuk dilakukan pengkajian, karena berkaitan dengan uang negara yang merupakan amanat rakyat yang menuntut adanya pertanggung jawaban akuntabilitas atas lembaga

Lembaga public yang mengelola keuangan tersebut baik pusat maupun daerah. Kewajiban pelaksanaan akuntabilitas public keuangan bagi setiap pemerintah daerah memunculkan dampak bagi system tata kelola pemerintah untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas kepada publik, yaitu berupa penyajian laporan keuangannya.

Penyusunan laporan keuangan diperlukan guna memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi, sehingga laporan keuangan menjadi suatu alat yang sangat berguna untuk membantu *top management* dalam proses pengambilan keputusan. Pada sector pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan aktivitas keuangannya kepada publik/ masyarakat, sehingga akan dungan informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus benar-benar berkualitas. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi laporan keuangan disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. (Nasution (2007)

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi keempat karakteristik tersebut untuk mencapai tujuannya, keempat karakteristik ini merupakan prasyaratn ormatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Informasi yang terkandung di dalamnya harus sesuai dengan criteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka

akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidak hemat, ketidak efisienan, dan ketidakfektifan. (Sukmaningrum, 2012).

Peraturan Pemerintah(PP) No 71 tahun2010 “menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus memenuhi criteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai dan manfaat yang disebutkan dalam kerangka konseptual diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami .Relevan berarti laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi. Andal berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan secara jujur, dapatdiferifikasi. Dapat dibandingkan yaitu informasi akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Dan dapat dipahami yaitu pengguna laporan dapat memahami dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai”.

Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) harusdisusunberdasarkansystempengendalian intern (SPI) seperti yang diamanatkan dalampasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 yang menyatakan kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD dilingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan system

pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.” Berkaitan dengan pelaksanaan system pengendalian intern tersebut pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Sistem pengendalian intern yang baruditetapkan pada tahun 2008 yaitu PP nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah (SPIP). (Nasution (2007).

Pasal 15 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan pemeriksa (BPK) menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pasal 16 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang memuat opini. Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Di dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK wajib menguji dan menilai SPI pemda yang bersangkutan, seperti diamanatkan dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 berbunyi “Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.” Tujuan SPI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan bagi pemda digunakan untuk memperbaiki system pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern. (Nasution (2007).

Berdasarkan sumber bpkp.go.id Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 atas tiga entitas yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak BPK, ketiga entitas pemeriksaan tersebut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejalan dengan pernyataan Bupati Bone Bolango Hamim Pou menyatakan raihan opini WTP untuk kabupaten Bone Bolango selama tujuh tahun berturut-turut tanpa jeda , pencapaian opini WTP ini adalah pencapaian pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta adanya sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk BPK yang terus memberikan masukan melalui rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah agar kualitas laporan keuangan semakin lebih baik. Namun demikian, pada hasil pemeriksaan BPK-TA 2019 ini walaupun telah dinyatakan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah secara umum. Permasalahan pertama berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan dan Belanja. BPK masih menjumpai adanya potensi retribusi persampahan dan tempat wisata yang belum dipungut, penggunaan langsung atas hasil pemungutan retribusi, penerbitan SP2D TU Nihil belum tertib, belumada monitoring dan evaluasi atas belanja bantuan sosial, kesalahan penganggaran pada belanja barang dan jasa dan belanja modal, serta penerima hibah belum menyampaikan pertanggung jawaban, penggunaan tidak sesuai Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pertanggung jawaban terlambat dan tidak lengkap. Permasalahan keduaberlakuanpadapengelolaanPembangunan. BPK menjumpai permasalahan berupa pencatatan penerimaan dan pelunasan pinjaman tidak

didukung surat pengesahan dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Permasalahan ketiga berkaitan dengan pengelolaan Kas, Piutang, dan Persediaan. BPK menjumpai permasalahan antara lain rekening bank belum ditetapkan oleh Kepala Daerah, pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU) dan penyetoran pendapatan tidak tertib, piutang sewa berlarut-larut, serta masa kadaluwarsa obat dan bahan medis pakai habis kurang dari 24 bulan saat diterima. Permasalahan keempat berkaitan dengan pengelolaan Aset Tetap. BPK masih menjumpai permasalahan antara lain asset tetap tidak dilengkapi informasi yang memadai seperti status, lokasi, luasan dan ukuran volume, sebagian fisiknya tidak dapat ditelusuri, tidak didukung bukti kepemilikan yang memadai, serta dicatat secara gelondongan. Permasalahan kelima berkaitan dengan aspek kepatuhan Pendapatan. BPK menjumpai permasalahan antara lain pemungutan retribusi tanpa SKRD, penggunaan langsung hasil pemungutan, dan potensi pendapatan tidak dipungut. Permasalahan keenam berkaitan dengan aspek kepatuhan belanja barang dan jasa. BPK menjumpai permasalahan antara lain pertanggung jawaban belanja BOS tidak tertib, pengadaan bahan makanan pasien RSUD tidak sesuai ketentuan seperti tanpa pelelangan, harga bahan melebihi harga satuan di kontrak, dan realisasi melebihi nilai kontrak. Permasalahan ketujuh berkaitan dengan aspek kepatuhan belanja modal. BPK menjumpai permasalahan antara lain pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak diantaranya kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakandenda dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan berharap Pemerintah Daerah terkait dapat memberikan perhatian yang serius dengan segera menindak lanjuti

rekomendasi yang telah disampaikan BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan. “Atas permasalahan yang masih menjadi perhatian BPK diharapkan Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo segera melaksanakan kewajiban sebagai tindak lanjut rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dapat diberikan auditor apabila telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian diberikan apabila: 1) Tidak ada bukti yang kompeten dan mencukupi atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, 2) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat Tidak Wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat apabila: 1) Ada pembatasan yang sangat material terhadap lingkup audit, 2) Auditor tidak independen terhadap klien. Terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor tidak diperkenankan mencantumkan paragraph lingkup audit apabila ia menyatakan untuk tidak memberikan pendapat (Indra, 2011:194-196).

Dari berbagai uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa system pengendalian intern mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern pada pemerintahan diperlukan oleh semua bidang guna tata kelola pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku demi tercapainya tujuan, dalam Pengembangan unsur system pengendalian intern pemerintahan (SPIP) perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumberdaya manusia, kejelasan criteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Menurut Situmorang (2016) “hal penting yang tidak boleh kita abaikan jika berbicara tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah system pengendalian internal pemerintah. Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendektsian penggelapan (fraud) secara dini. Sistem Pengendalian Internal akan membantu memandu instansi pemerintah berjalan sebagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang Sistem Pengendalian Internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliable”.

Dalam pelaksanaan kegiatannya pengelolaan keuangan menuju terciptanya laporan keuangan yang berkualitas maka pemerintah daerah harus membangun dan menerapkan system pengendalian intern yang handal. Menurut Mahmudi,(2011)“sering terjadinya berbagai kasus korupsi ,penyelewengan keuangan negara, pemborosan anggaran dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk salah satunya adalah lemahnya system pengendalian

intern yang diterapkan oleh pemerintah daerah tersebut”.

Sejalan dengan pernyataan (Mahmudi,2011) teori Nasution (2007) pun menyatakan ada beberapa kelemahan dalam system keuangan negara Indonesia di era orde baru yaitu: (1) kelemahan dalam desain dan pelaksanaan system pengendalian intern, (2) ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (3) penyimpanan keuangan negara yang semrawut, (4) tidak adanya informasi tentang aset dan hutang negara, dan (5) pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak memadai. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh.

Hal inimenjadi Perhatian dari peneliti yang dikhkususkan pada SistemPengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dilingkungan pemerintah Bone Bolango yang sudah di terapkan sejak tahun 2016 dan capaian hasil pemeriksaan opini WTP pun diperoleh selama tujuh tahun berturut-turut tanpa jeda. Namun walaupun memperoleh opini WTP pihak BPK masih memiliki beberapa temuan yang masih harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah, oleh karenanya tercapainya tujuan pelaksanaan SPIP dapat dilakukan dengan proses yang integral pada tindakan serta kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus tentunya oleh pimpinandan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KantorBadan Keuangan dan Pendapatan DaerahKabupaten Bone

Bolango dengan judul **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1). Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), serta Pemantauan (X5) secara simultan Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten BoneBolango?
- 2). Seberapa besar Pengaruh SPIP-Lingkungan Pengendalian (X1), Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten BoneBolango?
- 3). Seberapa besar Pengaruh SPIP-Penilaian Risiko (X2) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten BoneBolango?
- 4). Seberapa besar Pengaruh SPIP-Kegiatan Pengendalian (X3) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten BoneBolango?
- 5). Seberapa besar Pengaruh SPIP-Informasi Dan Komunikasi (X4) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten BoneBolango?
- 6). Seberapa besar Pengaruh SPIP-Pemantauan (X5) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten BoneBolango?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah memperoleh data tentang bagaimanakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), serta Pemantauan (X5) secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1). Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), serta Pemantauan (X5) secara simultan Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 2). Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh SPIP-Lingkungan Pengendalian (X1), Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 3). Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh SPIP-Penilaian Risiko (X2) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

- 4). Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh SPIP-Kegiatan Pengendalian (X3) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten BoneBolango.
- 5). Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh SPIP-Informasi Dan Komunikasi (X4) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten BoneBolango.
- 6). Untuk mengatahui dan menganalisis Pengaruh SPIP-Pemantauan (X5) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten BoneBolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan informasi yang diperoleh diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai sistem pengendalian intern Pemerintahan pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

b. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk kemajuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan sebagai bahan perbandingan sekaligus rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang masalah yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengendalian Intern

Aspek pengendalian intern merupakan salah satu unsur dari fungsi manajemen yang sangat penting. Pengendalian diartikan salah satu usaha dalam mengarahkan individu-individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Konsep-konsep dasar tentang pengendalian intern telah banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi profesi auditor baik sector publik maupun pemerintah. Mereka menerbitkan standar dan pedoman rancangan pengendalian intern dan membuat definisi dengan cara yang berbeda-beda. Masing-masing definisi menangkap konsep dasar pengendalian intern, tetapi menyatakannya dengan menggunakan kata-kata yang berbeda.

Dalam perkembangan teori pengendalian intern ini meskipun dilakukan dengan cara-cara yang berbeda, namun pada prinsipnya pembahasan dan pengertian dasarnya sama. Setiap definisi dapat dikatakan menggunakan pendekatan yang sejenis dalam mengenali ruang lingkup pengendalian intern, kaitannya dengan tujuan organisasi dan ketergantungannya pada personil dalam organisasi.

Untuk lebih jelasnya dan mudah dimengerti, bahwa pengendalian intern adalah unik untuk setiap kegiatan dan organisasi, sehingga penyebutannya juga akan tergantung dari ciri yang dapat dikenali melalui pengamatan, berikut ini akan diberikan beberapa definisi pengendalian intern.

2.1.1.1 Definisi Pengendalian Intern

Menurut Agoes Sukrisno (2012) bahwa “istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern. Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian intern”.

Menurut Mulyadi (2001) bahwa “pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan antara lain; 1) keandalan laporan keuangan, 2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 3) efektifitas dan efisiensi operasi. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI 2011) menyebutkan pengendalian intern didefinisikan sebagai sebuah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu a) keandalan pelaporan keuangan, b) efektivitas dan efisiensi operasi, c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. Sedangkan menurut COSO “(*Committee of Sponsoring Organization*) internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding to achievement of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah sebuah prosedur yang memuat kebijakan-kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Tujuan tersebut mencakup; a) keandalan pelaporan keuangan, b)efektivitas dan efisiensi operasi, c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.1.2 Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Menurut *Committee of Sponsoring Organization* (COSO) unsur-unsur pengendalian intern meliputi :

- a. Lingkungan pengendalian (*Control environment*). Pelaksanaan lingkungan pengendalian dalam sistem pengendalian intern adalah dasar atau fondasi sebelum melaksanakan komponen-komponen lain sebab lingkungan pengendalian ini berkaitan dengan kedisiplinan, etika dan struktur.
- b. Penilaian risiko (*Risk assessment*). Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko yang terjadi dalam mencapai tujuan.
- c. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*). Tahapan ini merupakan langkah pengambilan kebijakan, prosedur yang ditetapkan dalam memberikan suatu keyakinan bagi manajemen dimana segala ketentuan telah dilakukan.
- d. Infomasi dan komunikasi (*Information and communication*). Tahapan Informasi dan komunikasi perlu dilakukan manajemen dengan cara membangun sistem informasi yang efektif dan tepat waktu. Sistem informasi tersebut meliputi cara perekaman (*records*) melakukan identifikasi, penggabungan, membuat analisa, mengelompokkan, pencatatan dan pelaporan transaksi dalam penyusuna laporan pertanggung jawaban(akuntabilitas).
- e. Pemantauan (*monitoring*). Pemantauan merupakan langkah-langkah atau proses dalam melakukan suatu penilaian secara terus menerus terhadap kualitas

pelaksanaan pengendalian intern dan melakukan suatu perbaikan bila memungkinkan demi untuk perbaikan sistem pengendalian.

2.1.1.3 Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Tim Penyusun Modul Pengendalian Intern (STAN2007) bahwa “tujuan pengendalian intern yang dikemukakan oleh COSO yaitu a) Efektivitas dan efisiensi operasi, b) Keandalan pelaporan keuangan, dan c) Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. sedangkan AICPA merumuskan tujuan pengendalian internal yang harus diuji keberadaan dan efektivitasnya, yaitu: a) Dapat dipercaya dan integritas informasi b) Ketaatan pada kebijakan, rencana, Prosedur, UU dan peraturan. c) Pengamanan aktiva, d) Ekonomis dan efisiensi pengelolaan sumber- sumber daya, e) Efektivitas pencapaian tujuan”.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008) dalam Nugroho (2012) “tujuan dari sistem pengendalian intern adalah. keandalan laporan keuangan. manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan serta memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk menyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar dan sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan, b. efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi. Adanya pengendalian intern dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. adanya akurasi atas informasi keuangan dan non keuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan, c kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. perusahaan serta organisasi diharuskan mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku”.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam lingkungan organisasi pemerintahan yang bersifat birokrasi dan terstruktur, dikenal dengan istilah dan sebutan Sistem Pengendalian Intern. Istilah ini dapat disamakan dengan penyebutan Sistem Pengendalian Manajemen yang digunakan untuk merujuk Pengawasan Melekat pada masa-masa sebelum secara formal pemerintah mengadaptasikan Pengendalian Intern untuk mengelola kegiatan dan operasi pemerintahan. Penyelenggaraan SPIP merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, dan merupakan kewajiban setiap jenjang manajemen baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah atau disingkat LKPD pada prinsipnya adalah suatu pernyataan atau asersi yang dibuat oleh manajemen pemerintah daerah untuk menginformasikan kepada pihak-pihak sebagai pemegang kepentingan yang menggambarkan tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Maka untuk hal tersebut Menurut Mahmudi (2011), dalam rangka melindungi semua pihak yang menggunakan informasi laporan keuangan maka diwajibkan laporan keuangan tersebut diaudit oleh pihak ketiga yaitu auditor independen untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah haruslah berkualitas sehingga mampu meyakinkan para pemakai laporan keuangan tersebut sebagai pengambilan keputusan, oleh sebab itu diperlukan adanya pernyataan (opini) hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor ekstern. Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945, “yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

Negara Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia”.

Hasil pemeriksaan LKPD dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas keuangan Negara akan tergambar dari pernyataan atau opini yang dikeluarkan oleh BPK. Hasil pemeriksaan akan terkait dengan efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Dengan disahkannya PP 60 tahun 2008 menunjukkan suatu keseriusan dari pemerintah dalam membangun sistem pengendalian intern dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pemerintah secara efektif dan efisien khususnya dari segi tata kelola keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004 “tentang Perbendaharaan Negara, pasal 55 ayat (4) menyatakan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)”.

Selanjutnya, pasal 58 ayat (1) dan (2) “undang-undang tersebut juga menyatakan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggaran Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh”.

Menurut Inreswari (2010) "Dalam suatu sistem pengendalian intern yang efektif diperlukan adanya fungsi internal audit yang berperan sebagai „mata dan telinga“ dari pimpinan tertinggi organisasi. Secara berkala, internal auditor akan menyampaikan laporan hasil audit yang berisi rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemui dalam pemeriksaan. Laporan yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* pada tahun 2002 menunjukkan bahwa pengendalian intern yang kuat merupakan faktor yang paling efektif dalam upaya mengatasi korupsi dibandingkan dengan kamera pengintai (*surveillance camera*) sebagai faktor yang paling kurang efektif".

2.1.3 Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP

Ninda (2018) menyatakan bahwa "konsep yang mendasari suatu sistem pengendalian yang memandang bahwa sistem pengendalian intern ibu bukanlah kejadian atau keadaan yang terjadi sesaat saja, namun merupakan suatu kumpulan kejadian yang meliputi aktivitas kegiatan dari suatu instansi dalam memperoleh keyakinan bahwa tujuan tersebut akan dicapai. Konsep ini memberikan prinsip umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan SPIP yaitu:

- a. Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus. Sistem Pengendalian Intern akan efektif apabila dibangun ke dalam infrastruktur suatu instansi dengan menjadi bagian dari organisasi yang dikenal dengan istilah *built-in*. Pengertian *built-in* adalah suatu proses yang terintegrasi dengan kegiatan, dan akan menyatu dengan pelaksanaan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan sampai evaluasi.

- b. Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia. Efektivitas sistem pengendalian inten sangat bergantung pada manusia yang melaksanakannya. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau serta mengevaluasi pengendalian. Selanjutnya, seluruh pegawai dalam instansi memegang peranan penting untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif.
- c. Sistem pengendalian Intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Betapapun baiknya perancangan dan pengoperasian sistem pengendalian intern dalam suatu instansi, tidak dapat memberikan jaminan keyakinan yang mutlak bahwa tujuan instansi dapat tercapai. Hal ini disebabkan kemungkinan pencapaian tujuan tetap dipengaruhi oleh keterbatasan yang melekat dalam seluruh sistem pengendalian2 intern, seperti kesalahan manusia, pertimbangan yang keliru, dan adanya kolusi.
- d. Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
- e. Bentuk, luasan dan kedalaman pengendalian akan tergantung pada tujuan dan ukuran instansi, serta sesuai dengan kebutuhan dan ciri kegiatan serta lingkungan yang melingkapinya, karakter operasi dan lingkungan dimana kegiatan instansi dilaksanakan. Dengan konsep ini, tidak ada pengendalian yang dimiliki suatu instansi yang langsung dapat ditiru dan diterapkan pada instansi lain”.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan SPIP

Mahmudi (2011) “Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), antara lain:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan modal utama dan penggerak dalam suatu organisasi, dan merupakan *soft control* dalam penerapan SPIP ini. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah SDM yang memiliki integritas dan mentaati nilai etika. Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas dan mentaati etika adalah merupakan komponen penting dalam mendorong agar organisasi dapat berjalan pada relnya.

b. Komitmen

Komitmen merupakan keterikatan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi tersebut. Dalam penerapan SPIP, faktor komitmen pimpinan sangat diharapkan sehingga apapun keputusan maupun kebijakannya yang akan diambil terkait dengan perbaikan terhadap pengendalian intern, prosedur dan aturan yang akan dilaksanakan mendapatkan dukungan sepenuhnya daripimpinan..

c. Keteladanan dari Pimpinan

Lingkungan pekerjaan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan budaya kerja dalam suatu organisasi. Dalam suatu kondisi lingkungan yang kondusif, dengan pimpinan yang selalu memberikan contoh prilaku yang positif, selalu mendorong bawahan untuk terbiasa bersikap terbuka, jujur dan disiplin akan memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Keteladan pimpinan dalam bersikap dan bertingkah laku akan dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, etika dan disiplin.

d. Ketersediaan Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur mencakup antara lain: pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan unsur-unsur SPIP lainnya, sesuai dengan proses bisnis dan karakteristik suatu instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan SPIP. Keberadaan infrastruktur harus didukung oleh implementasi dari infrastruktur SPIP tersebut”.

2.1.5 PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengendalikan seluruh kegiatan dengan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dan juga merupakan kewajiban setiap jenjang manajemen. Hal ini untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 tersebut menyebutkan yaitu “SPIP adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Secara garis besar SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa “unsur-unsur SPIP meliputi :

a. Lingkungan Pengendalian

Setiap unit satuan dilingkungan instansi pemerintah harus menyelenggarakan secara seksama kegiatan lingkungan pengendalian sehingga memunculkan suatu perilaku yang baik, kondusif dalam menerapkan SPIP pada satuan kerjanya masing-masing dengan;

- 1). Menegakkan integritas dan nilai etika.

Menegakkan aspek integritas dan nilai etika minimal dengan cara:

- i. Melakukan penyusun dan melakukan penerapan aturan perilaku
- ii. Menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan aturan perilaku pada setiap tingkatan pimpinan instansi pemerintah.
- iii. Penegakan disiplin yang benar atas penyimpangan kebijakan, prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
- iv. Menjalaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern.
- v. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

- 2) Berkomitmen terhadap kompetensi

Lingkungan pengendalian berupa komitmen terhadap kompetensi dapat dilakukan dengan:

- i. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.
 - ii. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.
 - iii. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
 - iv. Memilih pimpinan instansi pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
- Kepemimpinan yang kondusif dapat ditunjukkan dengan :
- i. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan
 - ii. Menerapkan manajemen berbasis kinerja
 - iii. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP
 - iv. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah.
 - v. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah
 - vi. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyusun sebuah struktur organisasi senantiasa berlandaskan pada aturan yang berlaku dan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi yaitu:

- i. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansipemerintah.
 - ii. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi pemerintah.
 - iii. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansipemerintah.
 - iv. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis.
 - v. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- 5) Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- Melakukan pendeklegasian terhadap wewenang dan tanggung jawab dapat dilakukan dengan cara :
- i. Memberikan wewenang kepada pegawai yang sesuai dengan tingkat dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah.
 - ii. Para pegawai yang diberikan wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan berkaitan dengan pihak lain dalam instansi pemerintah yang bersangkutan
 - iii. Pegawai yang diberikan wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan penerapan SPIP.

- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber dayamanusia.

Dalam melakukan penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat dalam rangka pembinaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan :

- i. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.
- ii. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.
- iii. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

Dalam penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Pelaksanaan perwujudan tentang peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif dapat dilakukan dengan cara:

- i. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- ii. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- iii. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antara pemerintah terkait.

b. Penilaian risiko.

Pelaksanaan SPIP tentang penilaian risiko mencakup aspek identifikasi terhadap risiko dan melakukan analisis risiko. Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian risiko maka pimpinan suatu instansi dapat menetapkan tujuan instansi serta tujuan dari kegiatan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menentukan suatu tujuan tentang kegiatan maka dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah.
- 2) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.
- 3) Relevan dengan seluruh kegiatan utama pemerintah.
- 4) Mengandung unsur kriteria pengukuran.
- 5) Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup
- 6) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pelaksanaan identifikasi atas risiko oleh pimpinan suatu instansi pemerintah yaitu dengan mengenali faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh pemerintah.

Identifikasi risiko dapat dilaksanakan dengan cara:

- 1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.

- 2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktorinternal.
- 3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkanrisiko.

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telahdiidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapatditerima.

c. Kegiatan pengendalian

Pelaksanaan kegiatanpengendalianyaitususesuaidengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas danfungsiinstansipemerintahyang bersangkutan.Penyelenggaraan kegiatan pengendalian dpat dilaksanakan dengan cara:

- 1) Kegiatan pengendalian difokuskan pada kegiatanutama.
- 2) Kegiatan pengendalian dapat dihubungkan dengan tahapan penilaianrisiko.
- 3) Kegiatan pengendalian harus disesuaikan dengan sifat khusus dari instansi pemerintah.
- 4) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secaratertulis.
- 5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secaratertulis.
- 6) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengendalian suatu instansi pemerintah meliputi beberapa aspek yaitu:
 - 1) Melakukan reviu atas kinerja instansi pemerintah yangbersangkutan.

Reviu atas kinerja dilakukan dengan cara membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

2) Pembinaan sumber daya manusia

Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber daya manusia pimpinan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cara :

- i Mengomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai.
- ii Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi.
- iii Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kerja, serta rencana perkembangankarir.

3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

Pengendalian umum terdiri dari;

- i) Pengamanan sistem informasi terdiri dari:
 - Pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif.
 - Pengembangan rencana yang jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya.

- Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan.
 - Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas.
 - Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan
 - Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.
- ii) Pengendalian atas akses meliputi.
- Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitifitasnya.
 - Identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal
 - Pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi.
 - Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin
- iii) Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sekurang-kurangnya mencakup; a) Otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program, b) pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan, c) penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

- iv) Pengendalian atas perangkat lunaksistemsekurang-kurangnya mencakup;
 - a) Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawabpekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses, b) pengendalian dan pemantauan atas aksesdanpenggunaanperangkat lunak sistem, c) pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunaksistem.
- v) Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud adalah identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan adanya penetapankebijakanuntuk memisahkan tugas tersebut yaitu; a) penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas, b) pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosesur, supervisi, danreviu.
- vi) Kontinuitas pelayanan sekurang-kurangnya; a) penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasi sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif, b) langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasikomputer, c) pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga, d) pengujiansecaraberkalaatas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga danmelakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pengendalian aplikasi terdiri dari;

- i) Pengendalian otorisasi sekurang-kurangnya terdiri dari; a) pengendalian terhadap dokumen sumber, b) pengesahan atas dokumen sumber, c) pembatasan akses ke terminal entri data, d) penggunaan fiel indukdan

laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

- ii) Pengendalian kelengkapan sekurang-kurangnya; a) pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer, b) pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.
- iii) Pengendalian akurasi terdiri dari; a) penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data, b) pelaksana validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah, c) pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera, d) review atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.
- iv) Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sekurang-kurangnya; a) penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan, b) penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan, c) penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan, d) penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

4) Pengendalian fisik atas aset

Setiap pimpinan instansi diharuskan untuk melakukan pengendalian fisik atas aset. Dalam melakukan pengendalian fisik atas aset tersebut maka pimpinan instansi pemerintah harus menetapkan, mengimplementasikan,

dan mengomunikasikan kepada seluruh pegawai meliputi;

- a) rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik,
- b) rencana pemulihan setelah bencana

5) Penetapan reviu atas indikator dan ukurankinerja

Pimpinan instansi pemerintah dalam melakukan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cra;

- i. Menetapkan ukuran dan indikator kerja.
- ii. Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kerja.
- iii. Mengevaluasi faktor penilaian pengukurankinerja.
- iv. Membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

6) Pemisahanfungsi

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang.

7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.

Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan; a) transaksi dan kejadian

diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera, b) klasifikasi dan pencatatanya yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.

10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pelaksanaan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dilakukan dengan menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta mereviu atas penugasan tersebut secara berkala.

11) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Penyelenggaraan dokumentasi yang baik dengan, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang cepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan

komunikasi yang efektif sebagaimana pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya;

- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan saranakomunikasi.
- 2) Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus.

e. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauansistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan,evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviulainnya.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektifitas system pengendalain intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalai intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah”.

2.1.7 Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan PemerintahDaerah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2011) “Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkapbiasanya meliputineraca, laporan labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan

arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakaiannya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelapor dan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus”.

Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa “lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas”.

2.1.7.1 Karakteristik Kualitatif Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, menyatakan bahwa “terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: Relevan, Andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1). Relevan

Suatu laporan keuangan disebut relevan yaitu jika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat memengaruhi keputusan para pengguna dengan melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, serta mampu memprediksi masa depan, juga menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Jadi informasi laporan keuangan yang relevan tersebut dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan jika:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masakini.
- c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2). Andal

Informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus terbebas dari penjelasan yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan dapat dilakukan oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3). Dapat dibandingkan

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4). Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diwajibkan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud”.

2.1.7.2 Peranan Pelaporan Keuangan

SAP No 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*)”.

2.1.7.3 Tujuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan SAP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa “pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhankasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan”.

2.1.8 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa “komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Penyusunan laporan realisasi anggaran terdiri dari ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola

oleh pemerintah baik pusat dan daerah. Laporan ini juga menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasi dalam suatu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan tersebut berisi informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadisubrekening.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan operasional terdiri dari pendapatan laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luarbiasa.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periodetentu.

f. Laporan PerubahanEkuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pospos Ekuitas awal atau ekuitastahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi asettetap.

g. Catatan atas Laporan Keuangan(Calk)

Calk berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Calk meliputi informasi mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipakai entitas.Calk juga mencakup pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintah dan serta ungkapannya yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar”.

2.1.9 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dengan Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan.

Menurut Lomongga (2017) bahwa suatu sistem pada suatu organisasi dikatakan baik apabila sistem tersebut, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah sistem pengendalian intern.

Warren dkk (2005) mengemukakan bahwa : “dengan adanya sistem pengendalian intern maka terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dalam laporan keuangan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintahdaerah mengalami kekeliruan dalam penyusunan suatu laporan keuangan dan diharapkan agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Hall(2007) mengemukakan bahwa fungsi dari sistem pengendalian intern yaitu sebagai pelindung yang melindungi aktiva perusahaan dari banyaknya peristiwa yang tidak diinginkan yang menyerang perusahaan. Ini semua meliputi usaha untuk akses secara tidak sah ke aktiva perusahaan, penipuan yang dilakukan oleh orang dalam dan luar perusahaan, kesalahan karena karyawan tidak kompeten, program komputer salah data input yang rusak, dan lain sebagainya.

Mahmudi (2007) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat

dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah penjelasan hubungan antara bagian-bagian yang terdapat dalam sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yaitu :

1. Hubungan SPIP Lingkungan Pengendalian dengan Kualitas Laporan Keuangan.

Aspek Lingkungan pengendalian dalam SPIP merupakan pengendalian yang memengaruhi keseluruhan kegiatan dalam organisasi termasuk kegiatan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Lingkungan pengendalian menjadi atmosfir bagi individu dalam organisasi ketika mereka melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab atas pengendalian yang menjadi bagiannya. Dengan kata lain, Lingkungan Pengendalian merupakan pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian intern pemerintah. Apabila Lingkungan Pengendalian menunjukkan kondisi yang baik, maka dapat memberi pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat (Tony, 2008)

2. Hubungan SPIP Penilaian Risiko dengan Kualitas Laporan Keuangan.

Penilaian resiko terkait dengan aktivitas bagaimana entitas mengidentifikasi dan mengelola resiko sehingga entitas dapat meminimalisasi terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui proses penilaian resiko ini, maka setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal (Tony, 2008). Menurut Anindita (2006), penilaian resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko dari suatu pemerintah daerah yang berkaitan dengan

penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disesuaikan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan

3. Hubungan SPIP Aktivitas Pengendalian dengan Kualitas Laporan Keuangan.

Anindita (2006) mengemukakan bahwa aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dapat digolongkan sebagai berikut:a. pengendalian umum yang meliputi organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data;b. pengendalian aplikasi, mempunyai tujuan untuk menjamin bahwa semua transaksi yang telah diproses sekali saja secara lengkap, menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti, menjamin bahwa hasil pengolahan data dan transaksi benar dan sesuai keadaan, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi.

4. Hubungan SPIP Informasi dan Komunikasi dengan Kualitas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem akuntansi adalah salah satu bentuk informasi yang paling penting karena diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menganalisa dan melaporkan transaksi serta menyelenggarakan pertanggung jawaban kekayaan dan utang dari suatu pemerintah daerah, sedangkan komunikasi yang baik yang terjalin antar personel pemerintah daerah dapat memudahkan terjadinya perputaran informasi, hal ini akhirnya dapat menambah akurasi dari suatu laporan keuangan (Anindita, 2006)

5. Hubungan SPIP Pemantauan dengan Kualitas Laporan Keuangan.

Menurut Wawan (2009) pelaksanaan pemantauan atau pengawasan intern yang dilakukan secara efektif dapat mengakibatkan sistem akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan berjalan dengan baik, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, pemberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Pengawasan yang dilakukan dapat menjadi jaminan yang cukup tidak hanya untuk sistem akuntansi keuangan daerah, namun memberikan pula jaminan yang cukup bagi sasaran kinerja yang ingin dicapai, dilaksanakannya pengawasan intern yang efektif dan kontinyu pada kegiatan dapat menjamin kinerja pemerintah daerah tercapai dengan baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas..

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

- a. Amarini Ninda (2018), Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan jumlah sampel jenuh sebanyak 100 orang responden PPK- SKPD Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan secara parsial lingkungan pengendalian, penilaian risiko berpengaruh signifikan sedangkan kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan

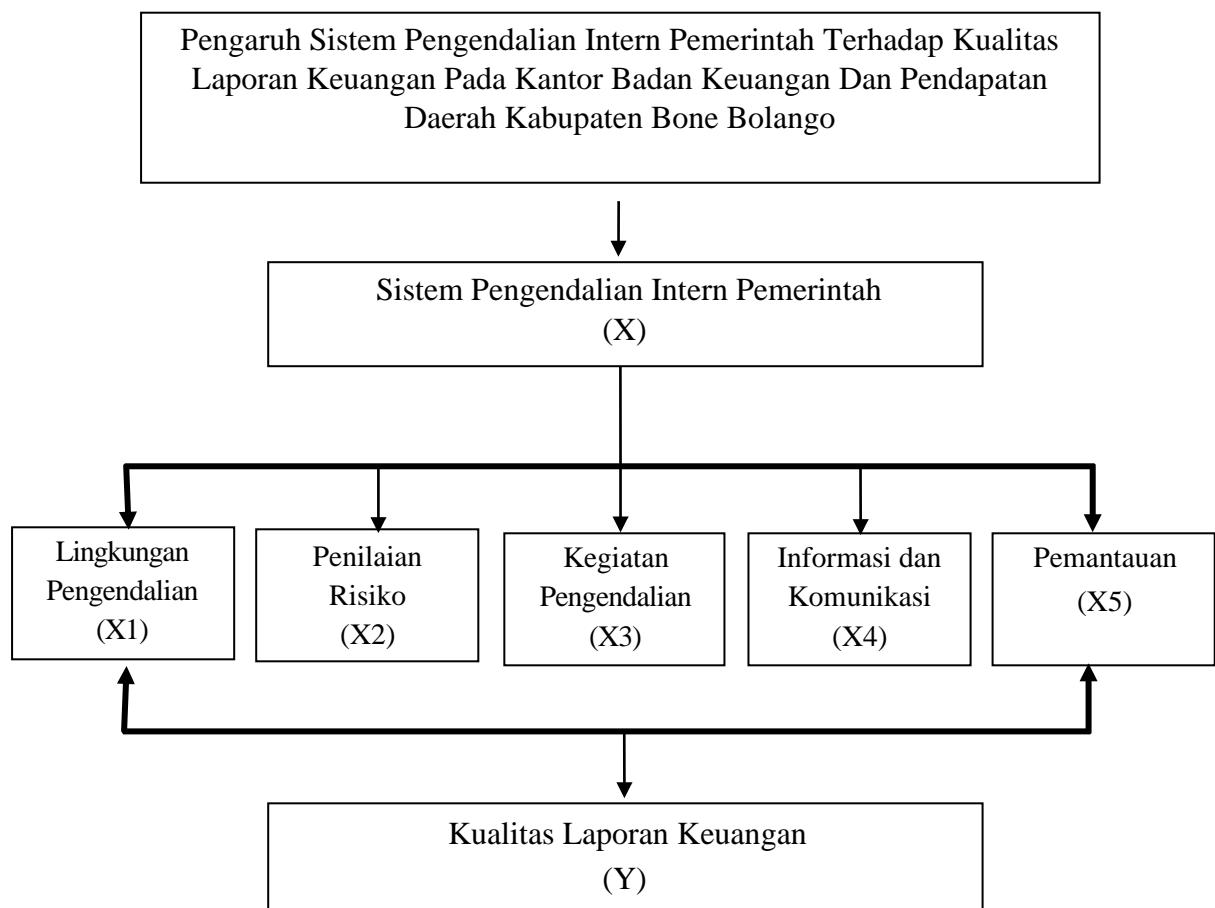
b. Fandi Wijaya (2017), Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Kota di Provinsi Lampung metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pementauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatanyang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Unsur-unsur SPIP tersebut meliputi ; a) lingkungan pengendalian, b) penilaian risiko, c) kegiatan pengendalian, d) informasi dan komunikasi; dan e) pemantauan pengendalian intern.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, menyatakan bahwa

terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: Relevan, Andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan maka akan dijabarkan pada gambar berikut ini :



2.3. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

- 1). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), serta Pemantauan (X5) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 2). SPIP-Lingkungan Pengendalian (X1), berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 3). SPIP-Penilaian Risiko (X2), berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 4). SPIP-Kegiatan Pengendalian (X3), berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 5). SPIP-Informasi dan Komunikasi (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 6). SPIP-Pemantauan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, maka yang menjadi objek penelitian adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), serta Pemantauan (X5) dan Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan ilmiah berdasarkan karakteristik ilmu itu merupakan gabungan antara pendekatan rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono:2012). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian dengan metode survey dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka dan kata-kata atau kalimat dengan gambar serta memakai sampel dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data pokok.

Penelitian kuantitatif menggunakan data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat dikelompokan menjadi dua yaitu data diskrit dan kontinum. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang bukan

mengukur. (Sugiyono:2012). Sedangkan data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran, data kontinum dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu: Ordinal, Interval dan Rasio.(Sugiyono:2012).

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu perlu mengoperasikan variabel-variabel seperti yang telah di bahas pada latar belakang masalah dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indikator-indikator dari variabel-variabel yang bersangkutan sekaligus menentukan instrument atau pengukuranvariabel.

Berdasarkan kerangka pikir maka yang menjadi operasional variabel dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Operasional Variabel X

Variable	Sub Variabel	Indikator	Skala
	Lingkungan Pengendalian (X1)	1. Menegakkan integritas, aturan, nilai etika 2. Komitmen terhadap Kompetensi 3. Kondusif 4. StrukturOrganisasi 5. Wewenang,tanggungjawab 6. Prosedur pembinaan SDM 7. Aparat pengawas intern 8. Hubungan kerja	Ordinal
	Penilaian Risiko (X2)	1. Penilaian risiko atas salah saji LaporanKeuangan 2. Metode faktorrisiko 3. Dampakrisiko 4. Prinsip kehati hatian tingkat risiko.	Ordinal

<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP (X)</p>	<p>Kegiatan Pengendalian (X3)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran, kompleksitas, sifat dari tugas fungsi masing- masing. 2. SPIP secaratertulis 3. SPIP dilaksanakan sebagaimana mestinya 4. Evaluasiterukur 5. PembinaanSDM 6. Pengendalian sistem informasi 7. Pengendalian fisikaset 8. Pengendalianukuran Kinerja 9. Pengendalianpemisahan fungsi dan otorisasi 10. Pencatatan akurat, tepat Waktu 11. Pembatasan akses 12. Laporan pertanggungjawaban 13. Dokuntansi bukti transaksi 	<p>Ordinal</p>
	<p>Informasi Dan Komunikasi (X4)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi, pencatatan, komunikasi informasi tepat waktu 2. Identifikasi, pencatatan, komunikasi secaraefektif 3. Saranakomunikasi 4. Pengelolaan, pengembangan sistem Informasi 	<p>Ordinal</p>
	<p>Pemantauan (X5)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitaspemantauan 2. Pemantauansecara berkelanjutan 3. Evaluasi terpisahaparat SPIP, pihak eksternal 4. Tindak lanjuthasil pemeriksanaan 	<p>Ordinal</p>

Sumber : PP Nomor 60 tahun 2008

Tabel 3. 2 Operasional Variabel Y

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Relevan	1. Laporan keuangan dapat mengoreksi ekspektasi di masa lalu 2. Laporan keuangan dapat memprediksi 3. Penyelesaian laporan keuangan tepatwaktu 4. Penyajian laporankeuangan secara lengkap	Ordinal
	Andal	5. Transaksi terekam secarajujur 6. Informasi dapat diperiksa oleh pihak lain 7. Tidak berpihak dan bersifat umum	Ordinal
	Dapat Dibandingkan	8. Informasi keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya	Ordinal
	Dapat Dipahami	9. Informasi keuangan dapat Dipahami	

Sumber : Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP

Dengan melakukan test maka dari setiap masing-masing variabel diukur dengan menggunakan skala Likert. Teknik skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala social.(Riduwan:2014)

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi sub variabel, kemudian sub variabel dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Dari setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata dan diberikan dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Bobot Nilai Variabel

Pilihan	Bobot
Sangat setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

(sumber Riduwan : 2014)

3.2.3 Populasi dan Sampel

3.2.3.1 Populasi

Populasi merupakan hal yang sangat penting pada penelitian kuantitatif. Penentuan populasi. Populasi merupakan wilayah yang ditentukan oleh peneliti dan terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang digunakan untuk dipelajari dan disimpulkan lebih lanjut (Sugiyono:2012). Menurut (Riduwan:2014) “populasi merupakan total dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian atau populasi merupakan objek/subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian”. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada kantor BKPD Kabupaten. Bone Bolango yang berjumlah 85orang.

Tabel 3.3**Populasi pada Kantor BKPD Kabupaten Bone Bolango**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1 orang
2.	Sekretariat	7 orang
3.	Bidang Pendapatan	20orang
4.	Bidang Anggaran	12orang
5.	Bidang Perbendaharaan	18orang
6.	Bidang Akuntansi	12orang
7.	Bidang Aset	15orang
Jumlah Total Populasi =		<hr/> <hr/> 85orang

Tidak semua populasi akan digunakan dalam penelitian ini tetapi hanya diambil sebagian dari jumlah tersebut. Mengambil sebagian dari jumlah populasi disebut sampel. Ukuran sampel pada dasarnya merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya suatu sampel yang diambil untuk melaksanakan suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2012) “pengertian sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut dan untuk memperoleh sampel yang mencerminkan karakteristik populasi secara tepat tergantung dari metode penarikan sampel dan ukuran sampel”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel secara *Purposive Sampling*. Metode *Purposive Sampling* adalah teknik sampel yang dilakukan dengan mengambil sebagian dari jumlah populasi yang dianggap memahami tentang persoalan yang sedang diteliti yaitu berkaitan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada BKPD Kabupaten Bone Bolango yaitu berjumlah 26 orang seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4**Jumlah Sampel pada Kantor BKPD Kabupaten Bone Bolango**

Jabatan	Jumlah
Kepala Badan	1
Sekretaris	1
Bidang pendapatan	6
Bidang akutansi	12
Bidang perbendaharaan	4
Bidang Asset	2
Total	26

Sumber : Keuangan Pendapatan Daerah Bone Bolango (2018)

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

3.2.4.1 Jenis Data

Adapun jenis dari data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang berbentuk bilangan dimana nilainya dapat berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah hasil kuisioner dengan menggunakan skala likert yang disebarluaskan kepada responden.
2. Jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif yaitu jenis data yang bukan data bilangan tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan serta gambaran suatu objek. Dalam penelitian ini data kualitatif adalah kondisi instansi pemerintahan atau sejarah instansi pemerintahan.

3.2.4.2 Sumber data

1. Data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal

dari para responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner/angket

2. Data sekunder. Data sekunder berupa data informasi penunjang penelitian. Didapat dan diolah dari sumber interen instansi pemerintahan, maupun sumber eksteren dari lain yang berkorelasi dan relevan yang berasal dari jurnal-jurnal, serta publikasi hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topic pembahasan penelitian.

3.2.5 Teknik pengumpulandata

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.(Riduwan:2014):

- a. Angket, yaitu daftar pertanyaan/kuisioner yang diberikan peneliti kepada responden dilapangan.
- b. Wawancara, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah informasi dari pertanyaan. Dengan mengajukan pertanyaan kepada pimpinan atau pegawai yang memiliki keterkaitan tersebut dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.
- c. Pengamatan (observasi), yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian atau lokasi penelitian.
- d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter dari lokasi penelitian ini.

3.2.6 Pengujian instrument penelitian

Instrument penelitian harus berkualitas yang sudah distandardkan sesuai dengan kriteria teknik pengujian validitas dan reliabilitas. Adapun pengujian validitas dan reliabilitas sebagaimana berikut:

3.2.6.2 Uji validitas data

Menurut Arikunto dalam (Riduwan:2014) bahwa uji validitas yaitu pengujian yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur atau tingkat kevalidan. Menurut Sugiyono (2012) “suatu instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu juga valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”.

Uji validitas yang digunakan yaitu dengan mengorelasikan tiap-tiap butir alat ukur dengan jumlah skor yang merupakan jumlah tiap skor butir, dengan rumus *pearson Product Moment* adalah:

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X). (\sum Y)}{\sqrt{\{n.\sum X^2 - (\sum X)^2\}. \{n.\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :

- r_{hitung} = Koefisien korelasi
- $\sum X_i$ = Jumlah skor item
- $\sum Y_i$ = Jumlah skor total (seluruh item)
- n = Jumlah responden

Menurut Masrun (1979) dalam Sugiyono (2012) bahwa teknik validitas dengan korelasi dalam menentukan validitas item sampai saat ini adalah teknik yang paling banyak digunakan. Selanjutnya untuk menentukan tingkat kevalidan dari item kuesioner tersebut maka nilai korelasi (r) dibandingkan dengan nilai r kritis sebesar 0,3. Apabila nilai r lebih besar dari nilai r kritis maka item kuesioner tersebut valid

demikian pula sebaliknya apabila nilai r lebih kecil dari nilai r kritis maka item kuesioner tersebut tidak valid.

3.2.6.3 Uji Reliabilitas data

(Riduwan:2014) Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara mencobakan instrument sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Pengujian reliabilitas instrument dapat dilakukan dengan teknik “*Alpha Cronbach*”. Menurut Ghozali (2005) dengan rumus sebagai berikut :

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S^2} \right)$$

Keterangan :

$$\begin{aligned} K &= \text{Jumlah instrumen pertanyaan} \\ \sum S_i^2 &= \text{Jumlah varians dalam setiap instrumen} \\ S &= \text{varians keseluruhan instrumen} \end{aligned}$$

Suatu variabel di katakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2005). Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin dicapai

3.2.7 Konversi Data

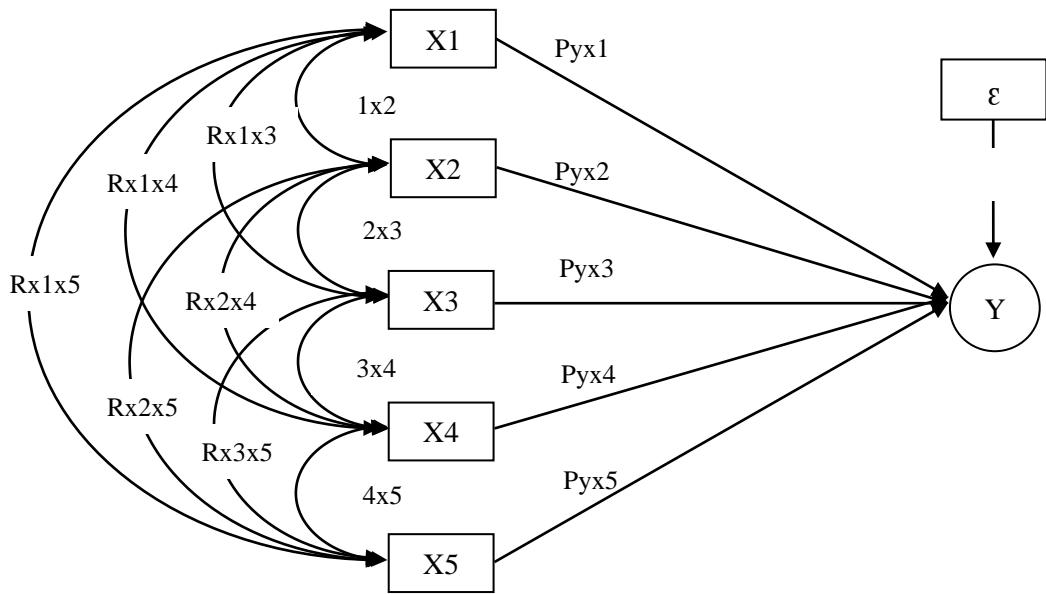
Dalam melakukan pengukuran variabel-variabel penelitian maka akan dilakukan penyebaran kuisioner kepada para responden. Data responden yang sudah terkumpul merupakan data yang berskala ordinal. Karena dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik dalam menganalisis sehingga diperlukan data dengan ukuran skala interval.

Oleh sebab itu data yang terkumpul dengan skala ordinal tersebut harus dikonversi menjadi data interval. Tujuan adalah untuk dinaikan ketinggian pengukuran data tersebut. Proses menaikan data ordinal menjadi data interval akan menggunakan SPSS dengan MS.Excel

3.2.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis), yaitu digunakan untuk mengukur besarnya sumbangannya (kontribusi) variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari : Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4) dan Pemantauan (X5) yang memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) pada kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Untuk memastikan sub-sub variabel apakah ada pengaruh maka pengujian dilakukan dengan analisis jalur, dengan terlebih dahulu mengkonversi data ordinal ke skala interval serta dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Dimana :

- X1 = Lingkungan Pengendalian
- X2 = Penilaian Risiko
- X3 = Kegiatan Pengendalian
- X4 = Informasi dan Komunikasi
- X5 = Pemantauan
- ϵ = variable lain
- Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

3.2.9 Pengujian Hipotesis

Sesuai dengan hipotesis dan desain penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam pengujian hipotesis menggunakan path analysis, (Riduwan:2012:116) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1 Merumuskan $Y = \rho_{yx1}X1 + \rho_{yx2}X2 + \rho_{yx3}X3 + \rho_{yx4}X4 + \rho_{yx5}X5 + \rho_y\epsilon_1$
- 2 Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi
- 3 Menghitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan)
- 4 Menghitung koefisien jalur secara individu (parsial)
- 5 Meringkas dan menyimpulkan

BAB IV

GAMBARAN UMUM, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian

Badan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 pasal 3 ayat (3), tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas, dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Keuangan Pendapatan Daerah BoneBolango.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunanya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Menimbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk Rancangan RenjaSKPD.

Kemudian pada tanggal 1 januari 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Bolango No17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) berubah menjadi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD).

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran BKPD

Untuk melaksanakan aktivitas organisasi perlu ditunjang oleh visi yang baik maka yang menjadi visi Sebagai Pengelola Keuangan Daerah yang terpercaya guna mendorong terwujudnya tata pemerintah daerah yang baik (*Good Governance*). Yang menjadi Visi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango yaitu “menjadi pengelola keuangandaerah yang terpercaya (amanah) guna mendorong terwujudnya tata pemerintah yang baik (*Good Governance*) melalui upaya peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah serta asset yang tertib, efisien, transparan, bertanggung jawab dan taat pada peraturan perundang-undang”.

Misi yaitu terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan misi yang dirumuskan untuk “Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Profesional”. Tujuannya yaitu“ Pengelolaan Keuangan Daerah Semakin Berkualitas” dengan indikator tujuan “ Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan sasaran sebagai berikut. Sasaranya yaitu 1). Terwujudnya system dan prosedur pertanggung jawaban keuangan daerah.2). Terwujudnya peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). 3). Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan indicator sasaran : Pendapatan Asli Daerah(PAD).

4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat BKPD Kabupaten Bonebolango ,yaitu:

1. Kepala Badan bertugas untuk membantu Kepala Daerah dalam kegiatan Pemerintahan. Fungsi dari kepala badan adalah:

- a. Pengkoordinasiaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dibidang keuangan, pendapatan dan assetdaerah
 - b. Pengkoordinasiaan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan, pendapatan dan assetdaerah
 - c. Pengkoordinasian penyusunan penrencanaan dibidang keuangan, pendapatandan asset daerah
 - d. Pengkoordinasian penataan dan mengkoodinir pelaksanaan teknis operasional dibidang keuangan, pendapatan dan assetdaerah
 - e. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang keuangan, pendapatan assetdaerah
 - f. Pengkoordinasian penyelengaraan kebijakan teknis dan menajerial dalam bidang keuangan dan pendapatanassetdaerah
 - g. Pengkoordinasian, pengendalian,evaluasi dan penialian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang keuangan, pendapatan dan assetdaerah
 - h. Pengkoordinasian penyusunan laporan dibidang keuangan pendapatan dan asset daerah
 - i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dari kewenangan Badan.
2. Sekretaris memiliki tugas dalam melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang terdiri dari bagian umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan dan juga melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut yaitu:

- a. Pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategi program dan kegiatan serta penyusunan laporan keuangan tahunan
 - b. Penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secaraterpadu
 - c. Penyelenggaraan urusan administrasi umum dalam kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan
3. Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki fungsi melaksanakan tugas dinas dibidang umum dan kepegawaian yakni:
 - ii. Melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan keprotokolan.
 - ii. Memberikan pelayan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - iii. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan
 - iv. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan asset milik negara dandaerah
 - v. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumah tangga dan
 - vi. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas badan dibidang keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya serta memiliki fungsi lainnya yaitu:
- i. Mengkoordinasikan urusan administrasi keuangan
 - ii. Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan rencana operasional kegiatan
 - iii. Mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan
 - iv. Menginvertaris dan menyiapkan data realisasi anggaran sesuai rencana program kerja
 - v. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis
 - vi. Mengumpulkan, mengolah penyajian data perencanaan
 - vii. Melakukan evaluasi pelaksanaan program
 - viii. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya
- a. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang perencanaan dan memiliki fungsi lainnya yaitu:
- i. Melaksanakan penyusunan rencana strategi program dan kegiatan tahunan
 - ii. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana

4. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pengelolaan data pelaporan, serta memiliki fungsi lainnya yaitu:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan serta bidang pengembangan sistem akuntansi sebagai dasar tugas
- b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan verifikasi bukti pembukuan
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas kewenagan badan

Bidang akuntansi terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan memiliki fungsi yaitu:
 - i. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan
 - ii. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data dan pelaporan sebagai dasar pelaksanaan tugas
 - iii. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara periodik
 - iv. Melaksanakan penyusunan dokumen/data laporan keuangan bulanan, triwulan, dan semester
 - v. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pada suatu bidang pengelolaan data dan pelaporan
 - vi. Pelaksanaan fungsi-fungsi

5. Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi memiliki fungsi yaitu:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengembangan akuntansi
 - b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengembangan sistem akuntansi
 - c. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi laporan realisasi APBD
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Leb dan catatan atas laporan keuangan
6. Bidang Pendapatan memiliki fungsi sebagai berikut yaitu:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan program dibidang pendapatan daerah
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional proses penguatan pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB,
 - c. Mengkoordinir pendataan subyek dan objek pajak serta penilaian objek pajak daerah dan retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - d. Mengkoordinir perekaman, pengolahan data, analisis, pencatatan dan penyajian informasi pendapatan daerah
 - e. Mengkoordinasikan penerbit ketetapan pajak daerah berdasarkan laporan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

f. Melaksanakan monitoring evaluasi dan laporan pengendalian pengawasan terhadap unit kerja terkait dalam hal pengelolaan pendapatan daerah.

Bidang Pendapatan Terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pajak Daerah yang memiliki fungsi sebagai yang melaksanakan tugas dalam urusan pajak daerah serta memiliki fungsi lainnya yaitu:
 - i. Menyusun perencanaan dan langkah-langkah kerja terkait pajak daerah
 - ii. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dibidang pelayanan pajak daerah
 - iii. Menghimpun dan mengelola data objek pajak dan subjek pajak daerah serta potensi penerimaan melalui surat pemberitahuan pajak daerah(SPTPD).
 - iv. Menyusun daftar induk wajib pajak daerah
 - v. Melakukan penetapan pajak daerah melalui surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
 - vi. Melakukan sosialisasi pajak daerah pada wajib pajak daerah
 - vii. Melakukan pengawasan serta penagihan pajak
 - viii. Melakukan penerimaan dan penyetoran pajak melalui bendahara penerimaan penyetoran kas daerah melalui surat setoran pajak daerah(SSPD) dan surat tanda setoran(STS)
 - ix. Melakukan pembukuan atau penerimaan pajak daerah dan

- x Pelaksanaan fungsi- fungsilainnya
- b. Sub Bidang Anggaran Dan Perbendaharaanterdiridari:
 - i. Bidang Anggaran Dan Pengendalian Anggaran Yang memiliki fungsi sebagaberikut:
 - ii. Melaksanakan Penyusunan rencana kegiatan dibidang anggaran dan pengendaliananggaran
 - iii. Melaksanakanpenyiapan kebijakan teknis dibidang anggaran dan pengendalian anggaran sebagai dasar pelaksanaantugas
 - iv. Melaksanakan penyiapan draf penyusunan rancangan peraturan daerah tengatang APBD dan perubahanAPBD.
 - v. Melaksankaan penyelenggaraankebijakanteknisAPBD
 - vi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran sebagai bahan penyusunan laporan
 - vii. Pelaksanaan fungsi- fungsilainnya
- c. Sub Bidang Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang memiliki fungsi sebagaberikut:
 - i. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dibidang perbendaharaandan system informasi keuangandaerah
 - ii. Melaksanakan penyiapankebijakan teknis dibidang perbendahraan dan system informasi keuangan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas
 - iii. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangandaerah

- iv. Melaksankan penyusunan system operasional prosedur pengelolaan keuangan
 - v. Melaksankan penelitian daftargaji
 - vi. Melaksankan penyiapan drafSKPP
 - vii. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang perbendaharaandan system informasi keuangandaerah sebagai bahanpenyusunanalaporan
 - viii. Pelaksanaan fungsi- fungsilainnya
2. Bidang Aset, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan tugas pengelolaan asset sesuai dengan aturan yang diberlakukan demi tertibnya pengelolaan assetdaerah
 - b. Menghimpun kebijakan teknis pengelolaan asset daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaantugas
 - c. Menyusun kebijakanteknis pengelolaan asset daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaantugas
 - d. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan asset daerah sesuai kebutuhan untuk menjadi programunit
 - e. Merencanakan pengadaan dan pendistribusian barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai pendukung kinerja pemerintahdaerah
 - f. Menginventarisir barang milik daerah sesuai jenisnya untuk mengetahui keadaan kekayaandaerah
 - g. Melakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk dibebaskan dari daftar inventaris kekayaandaerah

- h. Menyusun rencana penyertaan modal / investasi daerah sesuaikebutuhan untuk peningkatan pendapatan daerah
- i. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Responden

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang berjumlah 85 orang. Yang terdiri dari Kepala badan 1 orang, Sekretariat 7 orang, Bidang Pendapatan 20 orang, bidang Anggaran 12 orang, Bidang Perbendaharaan 18 orang, Bidang Akuntansi 12 orang dan Bidang Aset 15 orang. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*. Metode *Purposive Sampling* adalah teknik sampel yang dilakukan dengan mengambil sebagian dari jumlah populasi yang dianggap memahami tentang persoalan yang sedang diteliti yaitu berkaitan dengan SPIP dan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Pada BKPD Kabupaten Bone Bolango yaitu berjumlah 26 orang sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Jumlah Sampel pada Kantor BKPD Kabupaten Bone Bolango

Jabatan	Jumlah
Kepala Badan	1
Sekretaris	1
Bidang pendapatan	6
Bidang akuntansi	12
Bidang perbendaharaan	4
Bidang Asset	2
Total	26

Sumber : *Keuangan Pendapatan Daerah Bone Bolango (2020)*

4.2.2 Karakteristik Variabel Penelitian

Seluruh sub variabel bebas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Bobot-bobot butir instrument berdasarkan variabel terlebih dahulu di deskripsikan dengan melakukan perhitungan frekuensi dan skor berdasarkan bobot *option* (pilihan) jawaban. Perhitungan frekuensi dilakukan dengan cara menghitung jumlah bobot yang dipilih sedangkan perhitungan skor dilakukan melalui perkalian antara bobot *option* dengan frekuensi. Berikut proses perhitungannya:

Bobot terendah x Item x Jumlah responden: $1 \times 1 \times 26 = 26$ Bobot

Tertinggi x Item x Jumlah responden: $5 \times 1 \times 26 = 130$

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentan skala penelitian sebagai berikut :

Rentang Skalanya yaitu

Selanjutnya hasil tersebut akan dibuatkan tabel rentang skala sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Skala Penelitian Jawaban Responden

No	Rentang	Kategori
1	26 – 47	Sangat rendah
2	48 – 69	Rendah
3	70 – 91	Sedang
4	92 – 113	Tinggi
5	114 – 130	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Olahan data MS Excel

1. Hubungan Lingkungan Pengendalian (X1) dengan Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Lingkungan pengendalian merupakan pengendalian yang mempengaruhi keseluruhan organisasi dan menjadi “atmosfir individu organisasi di dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab atas pengendalian yang menjadi bagianya. Dengan kata lain, Lingkungan Pengendalian merupakan pondasi dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian intern pemerintah. Apabila Lingkungan Pengendalian menunjukkan kondisi yang baik, maka dapat member pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak sehat (Tony, 2008:5).

a. Sub Variabel Lingkungan Pengendalian (X1)

Hasil tanggapan responden variable Lingkungan Pengendalian(X1) berdasarkan tabulasi dari jawaban kuisioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari Lingkungan Pengendalian (X1) menurut tanggapan responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Nilai Skor Sub Variabel Lingkungan Pengendalian (X1)

BOBOT KOTEGORI RESP	PERNYATAAN 1			PERNYATAAN 2			PERNYATAAN 3			PERNYATAAN 4		
	F	SKOR	%									
5	18	90	69	9	45	35	9	45	35	14	70	54
4	8	32	31	16	64	62	16	64	62	12	48	46
3	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	26	122	100	26	112	100	26	112	100	26	118	100
KETERANGAN		ST			T			T			ST	

BOBOT KOTEGORI RESP	PERNYATAAN 5			PERNYATAAN 6			PERNYATAAN 7			PERNYATAAN 8		
	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%
5	13	65	50	8	40	31	5	25	19	11	55	42
4	13	52	50	17	68	65	16	64	62	15	60	58
3	0	0	0	1	3	4	5	15	19	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH KETERANGAN	26	117 ST	100	26	111 T	100	26	104 T	100	26	115 ST	100

Sumber : Data Olahan dengan MS Excel

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 26 orang responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada sub variabel Lingkungan Pengendalian (X1) adalah sangat tinggi dan tinggi artinya dari 8 item pernyataan rata-rata jawaban responden adalah sangat setuju dan setuju tentang lingkungan pengendalian yang dilakukan pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

2. Hubungan Penilaian Resiko (X2) dengan Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Penilaian resiko terkait dengan aktivitas bagaimana entitas mengidentifikasi dan mengelola resiko sehingga entitas dapat meminimalisasi terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui proses penilaian resiko ini, maka setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal (Tony, 2008:6). Menurut Anindita (2006:229), penilaian resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko dari suatu pemerintahan daerah yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

dan disesuaikan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan

b. Sub Variabel Penilaian Risiko (X2)

Sub variabel Penilaian Risiko (X2) terdiri atas 4 item pernyataan berdasarkan tabulasi data dari jawaban kusioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai masing-masing indikator dari Penilaian Risiko (X2). Menurut tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Nilai Skor Sub Variabel Penilaian Risiko (X2)

BOBOT KOTEGORI RESP	PERNYATAAN 1			PERNYATAAN 2			PERNYATAAN 3			PERNYATAAN 4		
	F	SKOR	%									
5	11	55	42	6	30	23	0	0	0	9	45	35
4	15	60	58	19	76	73	24	96	92	17	68	65
3	0	0	0	1	3	4	2	6	8	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	26	115	100	26	109	100	26	102	100	26	113	100
KETERANGAN		ST			T			T			T	

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 26 orang responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada sub variabel Penilaian Risiko (X2) pada umumnya dikategorikan Sangat tinggi dan tinggi yaitu rata-rata responden menjawab sangat setuju dan setuju tentang pelaksanaan penilaian risiko.

3. Hubungan Kegiatan Pengendalian (X3) dengan Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Menurut Anindita (2006:230) Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan sebagai berikut: a. Pengendalian Umum, meliputi organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standard untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan

data. b. Pengendalian Aplikasi, mempunyai tujuan untuk menjamin bahwa semua transaksi yang telah diproses sekali saja secara lengkap, menjamin bahwa data Transaksi lengkap dan teliti, menjamin bahwa hasil pengolahan data dan transaksi benar dan sesuai keadaan, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi.

c. Sub Variabel Kegiatan Pengendalian (X3)

Kegiatan Pengendalian (X3) terdiri dari 13 item pernyataan. Berdasarkan tabulasi data dari jawaban kusioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Nilai Skor Sub Variabel Kegiatan Pengendalian (X3)

BOBOT KATEGORI RESP	PERNYATAAN 1			PERNYATAAN 2			PERNYATAAN 3			PERNYATAAN 4		
	F	SKOR	%									
5	8	40	31	6	30	23	5	25	19	5	25	19
4	17	68	65	20	80	77	21	84	81	21	84	81
3	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	26	111	100	26	110	100	26	109	100	26	109	100
KETERANGAN		T			T			T			T	

BOBOT KATEGORI RESP	PERNYATAAN 5			PERNYATAAN 6			PERNYATAAN 7			PERNYATAAN 8		
	F	SKOR	%									
5	14	70	54	4	20	15	9	45	35	2	10	8
4	12	48	46	18	72	69	17	68	65	23	92	88
3	0	0	0	4	12	15	0	0	0	1	3	4
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	26	118	100	26	104	100	26	113	100	26	105	100
KETERANGAN		ST			T			T			T	

BOBOT KATEGORI RESP	PERNYATAAN 9			PERNYATAAN 10			PERNYATAAN 11			PERNYATAAN 12			PERNYATAAN 13		
	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%
u 5	6	30	23	8	40	31	4	20	15	10	50	38	8	40	31
m 4	20	80	77	17	68	65	21	84	81	15	60	58	18	72	69
b															
e 3	0	0	0	1	3	4	1	3	4	1	3	4	0	0	0
r 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	26	110	100	26	111	100	26	107	100	26	113	100	26	112	100
KET		T			T			T			T			T	

Sumber : Data Olahan dengan MS Excel

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 26 orang responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada sub variabel Kegiatan Pengendalian (X3) umumnya berada pada standar kategori sangat tinggi dan tinggi, artinya secara rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju dan setuju artinya kegiatan pengendalian ini sudah sepenuhnya dilaksanakan di kantor tersebut.

4. Hubungan Informasi dan Komunikasi (X4) dengan Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem akuntansi adalah salah satu bentuk informasi yang paling penting karena diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menganalisa dan melaporkan transaksi serta menyelenggarakan pertanggung jawaban kekayaan dan utang dari suatu pemerintah daerah, sedangkan komunikasi yang baik yang terjalin antar personel pemerintah daerah dapat memudahkan terjadinya perputaran informasi, hal ini akhirnya dapat menambah hak urasi dari suatu laporan keuangan (Anindita, 2006:230).

d. Sub Variabel Informasi Dan Komunikasi (X4)

Sub Variabel Informasi dan Komunikasi (X4) terdiri dari 4 item pernyataan. Berdasarkan tabulasi data dari jawaban kusioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari Sub Variabel Informasi dan Komunikasi (X4). Menurut tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikutini

Tabel 4.6

Nilai Skor Sub Variabel Informasi Dan Komunikasi (X4)

BOBOT KOTEGORI RESP	PERNYATAAN 1			PERNYATAAN 2			PERNYATAAN 3			PERNYATAAN 4		
	F	SKOR	%									
5	12	60	46	6	30	23	6	30	23	5	25	19
4	13	52	50	20	80	77	19	76	73	20	80	77
3	1	3	4	0	0	0	1	3	4	1	3	4
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	26	115	100	26	110	100	26	109	100	26	108	100
KETERANGAN		ST			T			T			T	

Sumber : Data Olahan dengan MS Excel

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 26 orang responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada sub variabel Informasi dan Komunikasi (X4) berada pada standar kategori Sangat Tinggi dan Tinggi untuk pernyataan 1 dengan kategori sangat tinggi untuk pernyataan 2,3 dan 4 adalah tinggi. Berdasarkan tanggapan tersebut maka pada dasarnya pelaksanaan informasi dan komunikasi pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan baik.

5. Hubungan Pemantauan (X5) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Menurut Wawan (2009:578) pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan secara efektif dapat mengakibatkan system akuntansi keuangan daerah yang

ditetapkan berjalan dengan baik, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan system akuntansi keuangan daerah, pemeberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Oleh karenaitu, pengawasan yang dilakuakan dapat menjadi jaminan yang cukup tidak hanya untuk system akuntansi keuangan daerah, namun memberikan pula jaminan yang cukup bagi sasaran kinerja yang ingin dicapai, dilaksanakannya pengawasan intern yang efektif dan kontinyu pada kegiatan dapat menjamin kinerja pemerintah daerah tercapai dengan baik.

e. Sub Variabel Pemantauan (X5)

Sub Variabel Pemantauan (X5) terdiri dari 4 item pernyataan. Berdasarkan tabulasi data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden sebanyak 26 orang maka diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari Sub Variabel Pemantauan (X5). Menurut tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikutini :

Tabel 4.7
Nilai Skor Sub Variabel Pemantauan (X5)

BOBOT KOTEGORI RESP	PERNYATAAN 1			PERNYATAAN 2			PERNYATAAN 3			PERNYATAAN 4		
	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKO R	%
5	11	55	42	10	50	38	0	0	0	12	60	46
4	15	60	58	15	60	58	23	92	88	14	56	54
3	0	0	0	1	3	4	3	9	12	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	26	115	100	26	113	100	26	101	100	26	116	100
KETERANGAN		ST			T			T			ST	

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 26 orang responden yang diteliti secara umum presepsi responden terhadap item-item pernyataan pada sub variabel Pemantauan (X5) umumnya berada pada standar kategori Sangat Tinggi dan Tinggi. Tanggapan responden tersebut mengisyaratkan bahwa aspek pemantauan telah

dilaksanakan dengan baik.

6. Variabel Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah(Y)

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) Pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango terdiri dari 9 item pernyataan. Berdasarkan tabulasi data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh respondendiperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari Kualitas Laporan Keuangan (Y). Menurut tanggapan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8

Nilai Skor Variabel Kualitas Pemeriksaan Laporan Keaungan Pemerintah(Y)

BOBOT KOTEGORI RESP	PERNYATAAN 1			PERNYATAAN 2			PERNYATAAN 3			PERNYATAAN 4			PERNYATAAN 5		
	F	SKOR	%												
5	6	30	23	6	30	23	1	5	4	1	5	4	6	30	23
4	18	72	69	19	76	73	19	76	73	19	76	73	17	68	65
3	2	6	8	1	3	4	6	18	23	6	18	23	3	9	12
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	26	108	100	26	109	100	26	99	100	26	99	100	26	107	100
KET		T			T			T			T			T	

BOBOT KOTEGORI RESP	PERNYATAAN 6			PERNYATAAN 7			PERNYATAAN 8			PERNYATAAN 9		
	F	SKOR	%									
5	3	15	12	7	35	27	6	30	23	8	40	31
4	20	80	77	19	76	73	19	76	73	16	64	62
3	3	9	12	0	0	0	1	3	4	2	6	8
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	26	104	100	26	111	100	26	109	100	26	110	100
KETERANGAN		T			T			T			T	

Sumber : Data Olahan dengan MS Excel

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 26 orang responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) umumnya berada pada standar kategori

Tinggi dan masih terdapat beberapa tanggapan responden yang memilih netral atau ragu.

4.2.3 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat atau instrument yang telah disiapkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan terlebih dahulu membagikan kuesioner kepada mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Ichsan Gorontalo semester akhir yang berjumlah 16 orang.

Uji validitas dilakukan dengan cara mengorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir, dengan rumus *pearson Product Moment*. Menurut Masrun (1979) dalam Sugiyono (2012) untuk menentukan tingkat kevalidan dari item kuesioner tersebut maka nilai korelasi (*r*) dibandingkan dengan nilai *r* kritis sebesar 0,3. Apabila nilai *r* lebih besar dari nilai *r* kritis maka item kuesioner tersebut valid demikian pula sebaliknya apabila nilai *r* lebih kecil dari nilai *r* kritis maka item kuesioner tersebut tidak valid. Hasil pengujian validitas untuk masing-masing sub variabel penelitian, dapat dijelaskan berikut ini :

1. Sub Variabel Lingkungan Pengendalian (X1)

Berdasarkan pengujian tingkat validitas subvariabel Lingkungan Pengendalian (X1) dengan menggunakan koefisien korelasi *pearson* dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9**Pengujian Validitas Sub Variabel Lingkungan Pengendalian (X1)**

Item Kuesioner	Koefisien Korelasi (r)	Nilai R Kritis	Keputusan *)
Item.PX1.1	0,831	0,30	Valid
Item.PX1.2	0,836	0,30	Valid
Item.PX1.3	0,726	0,30	Valid
Item.PX1.4	0,531	0,30	Valid
Item.PX1.5	0,623	0,30	Valid
Item.PX1.6	0,681	0,30	Valid
Item.PX1.7	0,751	0,30	Valid
Item.PX1.8	0,802	0,30	Valid

*) Valid jika nilai r lebih besar dari nilai r kritis (0,30)

Sumber : Data Olahan Statistik dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas seluruh item kuesioner koefisien korelasi positif dan nilai r >(lebih besar) dari nilai r kritis (0,30) hasil ini menunjukan bahwa seluruh item kuesioner tabel Lingkungan Pengendalian (X1) yang digunakan tersebut adalahvalid.

2. Sub Variabel Penilaian Risiko(X2)

Hasil pengujian validitas item pernyataan tabel Penilaian Risiko (X2) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.10
Uji Validitas Sub Variabel Penilaian Risiko (X2)

Item Kuesioner	Koefisien Korelasi (r)	Nilai R Kritis	Keputusan *)
Item.PX1.1	0,644	0,30	Valid
Item.PX1.2	0,572	0,30	Valid
Item.PX1.3	0,780	0,30	Valid
Item.PX1.4	0,736	0,30	Valid

*) Valid jika nilai r lebih besar dari nilai r kritis (0,30)

Sumber : Data Olahan Statistik dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa dari 4 (empat) item kuisioner koefisien korelasi bernilai positif dan dinyatakan valid karena nilai korelasi (r) $>$ (lebih besar) dari nilai r kritis. Menurut Sugiyono (2012) instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable.

3. Sub Variabel Kegiatan Pengendalian (X3)

Hasil pengujian validitas item pertanyaan sub variable Kegiatan Pengendalian (X3) dengan menggunakan Koefisien Korelasi pearson diuraikan dalam table berikut :

Tabel 4.11
Uji Validitas Sub Variabel Kegiatan Pengendalian (X3)

Item Kuesioner	Koefisien Korelasi (r)	Nilai R Kritis	Keputusan *)
Item.PX1.1	0,721	0,30	Valid
Item.PX1.2	0,429	0,30	Valid
Item.PX1.3	0,699	0,30	Valid
Item.PX1.4	0,687	0,30	Valid
Item.PX1.5	0,557	0,30	Valid
Item.PX1.6	0,718	0,30	Valid
Item.PX1.7	0,595	0,30	Valid
Item.PX1.8	0,573	0,30	Valid
Item.PX1.9	0,810	0,30	Valid
Item.PX1.10	0,498	0,30	Valid
Item.PX1.11	0,542	0,30	Valid
Item.PX1.12	0,589	0,30	Valid
Item.PX1.13	0,685	0,30	Valid

*) Valid jika nilai r lebih besar dari nilai r kritis (0,30)

Sumber : Data Olahan Statistik dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas seluruh item kuesioner koefisien korelasi bernali positif dan nilai $r >$ (lebih besar) dari nilai r kritis 0,30 sehingga hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner sub variabel kegiatan pengendalian (X3) yang digunakan adalah valid.

4. Sub Variabel Informasi Dan Komunikasi(X4)

Hasil pengujian validitas item pertanyaan sub variabel Informasi dan Komunikasi (X4) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12
Uji Validitas Sub Variabel Informasi Dan Komunikasi (X4)

Item Kuesioner	Koefisien Korelasi (r)	Nilai R Kritis	Keputusan *)
Item.PX1.1	0,414	0,30	Valid
Item.PX1.2	0,327	0,30	Valid
Item.PX1.3	0,545	0,30	Valid
Item.PX1.4	0,756	0,30	Valid

*) Valid jika nilai r lebih besar dari nilai r kritis (0,30)

Sumber : Data Olahan Statistik dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas seluruh item kuesioner koefisien korelasi (r) bernali positif dan nilai $r >$ (lebih besar) dari nilai r kritis (0,30) sehingga hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner sub variabel Informasi dan Komunikasi (X4) yang digunakan tersebut adalah valid.

5. Sub Variabel Pemantauan (X5)

Hasil pengujian validitas item pernyataan sub variabel Pemantauan (X5) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.13
Uji Validitas Pertanggungjawaban Manajemen (X5)

Item Kuesioner	Koefisien Korelasi (r)	Nilai R Kritis	Keputusan *)
Item.PX1.1	0,824	0,30	Valid
Item.PX1.2	0,746	0,30	Valid
Item.PX1.3	0,465	0,30	Valid
Item.PX1.4	0,834	0,30	Valid

*) Valid jika nilai r lebih besar dari nilai r kritis (0,30)

Sumber : Data Olahan Statistik dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas seluruh item kuesioner koefisien korelasi (r) bernilai positif dan nilai r >(lebih besar) dari nilai r kritis (0,30) sehingga hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner sub variabel Pemantauan (X5) yang digunakan tersebut adalah valid

6. Variabel Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeritah(Y)

Hasil pengujian validitas item pernyataan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) dengan menggunakan koefisien korelasi pearson diuraikan dalam tabel berikutini:

Tabel 4.14
Uji Validitas Variabel Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan (Y)

Item Kuesioner	Koefisien Korelasi (r)	Nilai R Kritis	Keputusan *)
Item.PX1.1	0,528	0,30	Valid
Item.PX1.2	0,585	0,30	Valid
Item.PX1.3	0,619	0,30	Valid
Item.PX1.4	0,456	0,30	Valid
Item.PX1.5	0,402	0,30	Valid
Item.PX1.6	0,554	0,30	Valid
Item.PX1.7	0,578	0,30	Valid
Item.PX1.8	0,422	0,30	Valid
Item.PX1.9	0,554	0,30	Valid

*) Valid jika nilai r lebih besar dari nilai r kritis (0,30)

Sumber : Data Olahan Statistik dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas seluruh item kuesioner koefisien korelasi (r) bernilai positif dan nilai r >(lebih besar) dari nilai r kritis yaitu 0,30 sehingga hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) yang digunakan tersebut adalah valid.

4.2.4 Hasil Uji Reabilitas

Uji reabilitas atau keandalan bertujuan untuk mengukur keandalan alatukur dengan cara memberikan skor yang relative sama pada seorang responden, walaupun responden mengerjakan dalam waktu yang berbeda. Uji reabilitas instrument hanya dilakukan pada butir-butir valid yang diketahui pada uji validitas instrument. Pengujian *Cronbach Alpha* digunakan untuk menguji tingkat keandalan (*reability*) dari masing-masing variabel. Apabila nilai *Cronbach Alpha* semakin mendekati 1 mengidentifikasi bahwa semakin tinggi pula konsistensi reabilitasnya. Hasil pengujian reabilitas terhadap item-item pernyataan dari setiap variabel penelitian ini dengan menggunakan *Cronbach Alpha* dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Uji Reabilitas Variabel Bebas dan Variabel Terikat

No	Variabel	Koefisien Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
1	Lingkungan Pengendalian (X1)	0,917	0,60	Reliable
2	Penilaian Risiko (X2)	0,856	0,60	Reliable
3	Kegiatan Pengendalian (X3)	0,921	0,60	Reliable
4	Informasi Dan Komunikasi (X4)	0,767	0,60	Reliable
5	Pemantauan (X5)	0,842	0,60	Reliable
6	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah(Y)	0,871	0,60	Reliable

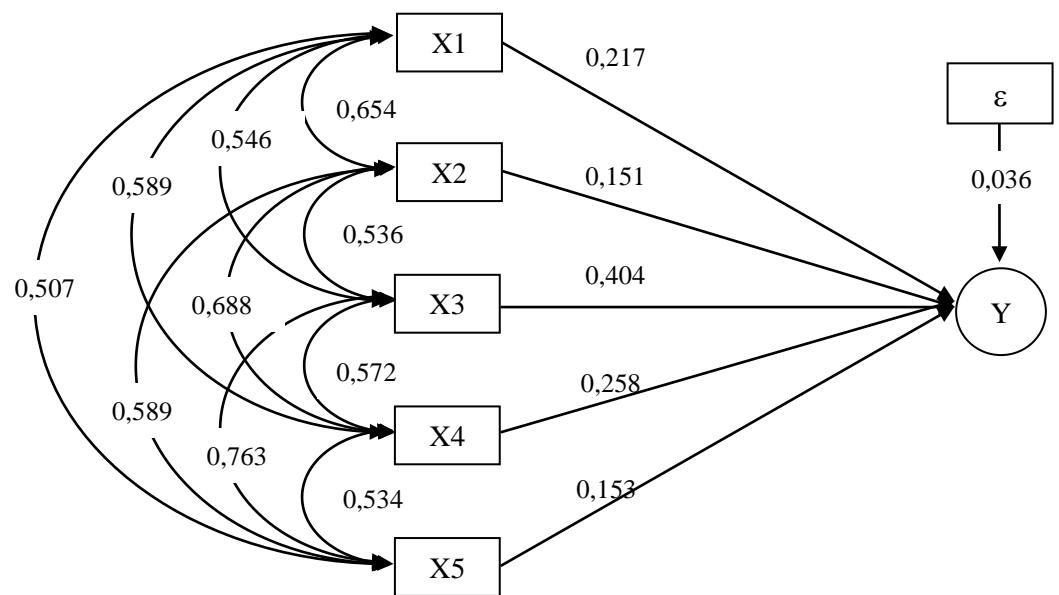
Sumber : Data Olahan Statistik dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka reabilitas (ri) untuk seluruh item pernyataan pada setiap sub variabel bebas SPIP dan variabel terikat Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah lebih besar 0,60 (nol koma enam puluh), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang terdiri dari sub variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), Pemantauan (X5) dikatakan reliabel.

4.2.5 Analisis Data Statistik

Analisis statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil analisis data statistik maka dapat dibuat struktur analisis jalur sebagai berikut:



Gambar 4.1 Hasil Analisis Jalur

Dari hasil model analisis jalur maka dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y = 0,217X_1 + 0,151X_2 + 0,404X_3 + 0,258X_4 + 0,153X_5 + 0,036\epsilon$$

Berdasarkan structural persamaan jalur tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub variabel Lingkungan Pengendalian (X1) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) sebesar 0,217 atau 21,70%. Nilai tersebut bermakna jika sub variabel Lingkungan Pengendalian (X1) lebih ditingkatkan dan diefektifkan pengelolaannya, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) akan meningkat sebesar 21,70%.
2. Sub variabel Penilaian Risiko (X2) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) sebesar 0,151 atau 15,10%. Nilai tersebut bermakna jika jika sub variabel Penilaian Risiko (X2) lebih ditingkatkan dan di efektifkan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) akan meningkat sebesar 15,10%.
3. Sub variabel Kegiatan Pengendalian (X3) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) sebesar 0,404 atau 40,40%. Nilai tersebut bermakna jika sub variabel Kegiatan Pengendalian (X3) lebih ditingkatkan dan diefektifkan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) akan meningkat sebesar 40,40%.
4. Sub variabel Informasi dan Komunikasi (X4) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) sebesar 0,258 atau 25,80%. Nilai tersebut bermakna jika sub variabel Informasi Dan Komunikasi (X4) lebih ditingkatkan dan diefektifkan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) akan meningkat sebesar 25,80%.
5. Sub variabel Pemantauan (X5) memiliki pengaruh dengan arah koefisien positif

terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) sebesar 0,153 atau 15,30%. Nilai tersebut bermakna jika sub variabel Pemantauan (X5) lebih di tingkatkan dan di efektifkan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) akan meningkat sebesar 15,30%.

6. Nilai R^2 sebesar sebesar 0,964 atau 96,40% menunjukkan besarnya pengaruh variasi variabel independen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X) terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) secara simultan sedangkan sisanya sebesar 0,036 atau 3,60% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.
7. Koefisien korelasi sub variabel X1 dan X2 signifikan dengan arah positif sebesar 65,40%, Koefisien korelasi sub variabel X1 dan X3 signifikan dengan arah positif sebesar 54,60%, Koefisien korelasi sub variabel X1 dan X4 signifikan dengan arah positif sebesar 58,90%. Koefisien korelasi sub variabel X1 dan X5 signifikan dengan arah positif sebesar 50,70%. Koefisien korelasi sub variabel X2 dan X3 signifikan dengan arah positif sebesar 53,60%. Koefisien korelasi sub variabel X2 dan X4 signifikan dengan arah positif sebesar 68,80%. Koefisien korelasi sub variabel X2 dan X5 signifikan dengan arah positif sebesar 58,90%. Koefisien korelasi sub variabel X3 dan X4 signifikan dengan arah positif sebesar 57,20%. Koefisien korelasi sub variabel X3 dan X5 signifikan dengan arah positif sebesar 76,30%. Koefisien korelasi sub variabel X4 dan X5 signifikan dengan arah positif sebesar 53,40%.

Berdasarkan gambar tersebut dapat juga dijelaskan bahwa besarnya pengaruh sub variabel SPIP yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian (X1) sebesar 21,70, sub variabel Penilaian Risiko (X2) sebesar 15,10%, sub variabel Kegiatan Pengendalian

(X3) sebesar 40,40%, sub variabel Informasi Dan Komunikasi (X4) sebesar 25,80%, dan sub variabel Pemantauan (X5) sebesar 15,30%. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Total Pengaruh dan Kontribusi
Simultan

Variabel	Koefisien Jalur	Total Pengaruh	Pengaruh Simultan
X1	0,217	21,70%	-
X2	0,151	15,10%	-
X3	0,404	40,40%	-
X4	0,258	25,80%	-
X5	0,153	15,30%	-
X1,X2,X3,X4,X5	-	-	96,40%

Sumber : Hasil Olahan Data Statistik dengan SPSS

4.2.6 Pengujian Hipotesis

4.2.6.1 Uji secara simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai signifikan yang digunakan yaitu pada level $\alpha = 0,05$ (5%)

Berdasarkan lampiran tabel *anova* nilai sig sebesar 0.000 yang berarti secara simultan seluruh variable independen : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Yang Terdiri Dari sub variabel Lingkungan Pengendalian (X1), sub variabel Penilaian Risiko (X2), subvariabel Kegiatan Pengendalian (X3), sub variabel Informasi Dan Komunikasi (X4), dan sub variabel Pemantauan (X5) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

4.2.6.2 Uji Perkiraan Ketetapan Model (*Goodness Of FitTest*)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *Goodness Of Fit* dari model analisis jalur, yaitu seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan lampiran tabel model *summary* menunjukkan nilai *R square* sebesar 0,964 atau 96,40%. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variabel independen secara bersama-sama (simultan) yang terdiri dari sub variabel Lingkungan Pengendalian (X1), sub variabel PenilaianRisiko(X2),subvariabel Kegiatan Pengendalian (X3), sub variabel Informasi Dan Komunikasi (X4), dansub variabelPemantauan(X5)yangdapatdisumbangkantukperubahanvariasi variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebesar 0,964 atau 96,40% dan sisanya sebesar 0,036 atau 3,60 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

4.2.6.3 Uji Parsial (Uji T)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial digunakan uji-t. Hasil perhitungan statistik pada pengujian parsial berdasarkan pada lampiran tabel *coefisient* dapat dijelaskan berikutini.

Sub variabel Lingkungan Pengendalian(X1) menunjukkan nilai *sig* sebesar 0,002 atau (0,20%) yang berarti $<$ dari nilai α 0,05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa subvariabel Lingkungan Pengendalian (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y), sehingga penelitian ini menerima hipotesis kedua. Sub variabel Penilaian Risiko (X2) menunjukkan nilai *sig* 0,036 (3,6%) yang berarti $<$ dari nilai α 5%. Hal ini menunjukkan bahwa sub variabel Penilaian Risiko (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) sehingga penelitian ini menerima hipotesis ketiga. Sub variabel Kegiatan Pengendalian (X3) menunjukkan nilai *sig* 0,000 (0,0%) yang berarti lebih $<$ dari nilai α 5% hal ini

menunjukkan bahwa sub variabel Kegiatan Pengendalian (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y), sehingga penelitian ini menerima hipotesis keempat. Sub variabel Informasi Dan Komunikasi (X4) menunjukkan nilai sig 0,001 (0,1%) yang berarti $<$ dari nilai $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa sub variabel Informasi Dan Komunikasi (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y), sehingga penelitian ini menerima hipotesis ke lima. Sub variabel Pemantauan (X5) menunjukkan nilai sig 0,039 (3,90%) yang berarti $<$ dari nilai $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa sub variabel Pemantauan (X5) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y), sehingga penelitian ini menerima hipotesis keenam.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis baik secara simultan ataupun secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.17

Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel X terhadap Y

Pengaruh antar Variabel	Total Pengaruh	Sig	Alpha	Keputusan	Hipotesis
X1,X2,X3,X4,X5 terhadap Y	0,964	0,000	0,05	Signifikan*	Diterima
X1 terhadap Y	0,217	0,002	0,05	Signifikan*	Diterima
X2 terhadap Y	0,151	0,036	0,05	Signifikan*	Diterima
X3 terhadap Y	0,404	0,000	0,05	Signifikan*	Diterima
X4 terhadap Y	0,258	0,001	0,05	Signifikan*	Diterima
X5 terhadap Y	0,153	0,039	0,05	Signifikan*	Diterima

Keterangan : * Signifikan apabila nilai sig $<$ nilai Alpha

Berdasarkan persamaan struktur tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Hipotesis pertama Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi sub variabel Lingkungan Pengendalian (X¹), Penilaian Risiko (X²), Kegiatan Pengendalian (X³), Informasi Dan Komunikasi (X⁴), Pemantauan (X⁵), Secara Simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

- Bone Bolango sehingga hipotesis pertama diterima.
2. Hipotesis kedua Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi sub variabel Lingkungan Pengendalian (X^1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. sehingga hipotesis kedua diterima.
3. Hipotesis ketiga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi sub variabel Penilaian Risiko (X^2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. sehingga hipotesis ketiga diterima.
4. Hipotesis keempat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi sub variabel Kegiatan Pengendalian (X^3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. sehingga hipotesis keempat diterima.
5. Hipotesis kelima Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi sub variabel Informasi Dan Komunikasi (X^4) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. sehingga hipotesis kelima diterima.
6. Hipotesis keenam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi sub variabel Pemantauan (X^5) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. sehingga hipotesis

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis statistic dan pengujian hipotesis dengan menggunakan program aplikasi statistik SPSS versi 21 dan Microsoft Exel, maka dapat diketahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui uji signifikansi. Hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan berikutini.

4.3.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Secara Simultan

Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Pemeriksaan

Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi variabel Sistem Pengendalian Intern berupa Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Bone Bolango. sebesar 96,40% dan sisanya sebesar 3,60% dipengaruhi oleh variabel luar yang tidak dijelaskan dalam model (variabel luar yang turut mempengaruhi variabel Y). Besarnya pengaruh ini menunjukkan bahwa, Penerapan SPIP merupakan struktur yang menyatu dalam suatu entitas, yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain. Nilai korelasi (r) adalah sebesar 98,20% di mana hasil ini termasuk dalam kategori sangat kuat dan menunjukkan bahwa Penerapan SPIP Pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada dasarnya sudah dilaksanakan

secara maksimal dalam rangka meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Perlunya peningkatan Penerapan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Bone Bolango yaitu agar dapat menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka memberikan keyakinan secara memadai atas pencapaian keandalan laporan keuangan, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta pelaksanaan dilakukan secara efisiensi, efektif dalam rangka menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintahdaerah.

4.3.2 Lingkungan Pengendalian (X1) Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah(Y)

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa sub variabel Lingkungan Pengendalian (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis Kedua yang menyatakan “Lingkungan Pengendalian (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)” dapat diterima. Koefisien sub variabel Lingkungan Pengendalian (X1) menunjukkan arah positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebesar 21,70%

Lingkungan pengendalian merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan SPIP karena aspek ini menjelaskan gambaran umum sikap suatu organisasi yang mempengaruhi tindakan dan kesadaran dari setiap personil ASN. Setiap pimpinan instansi wajib untuk memelihara dan menciptakan suatu lingkungan pengendalian yang kondusif serta melahirkan perilaku-perilaku ASN

yang positif dalam rangka pelaksanaan SPIP secara keseluruhan dilingkungan instansinya masing-masing. Aspek lingkungan pengendalian ini meliputi integritas nilai etika, komitmen dan kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai, pendeklegasian wewenang yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat, aparat pengawas SPIP yang efektif, dan hubungan kerja yang baik disetiaplini.

Pelaksanaan SPIP-Lingkungan Pengendalian dalam rangka peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat pada tanggapan responden dengan kategori tinggi dan sangat tinggi atau rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan yang disampaikan. Mereka menyatakan bahwa penerapan SPIP dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango telah memenuhi unsur-unsur yang diamanahkan dalam peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 tentang pelaksanaan SPIP. Aspek yang sangat tinggi dalam pelaksanaan SPIP-Lingkungan Pengendalian yaitu aspek penegakan intergritas, aturan dan nilai-nilai etika, pelaksanaan struktur organisasi, wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing ASN, dan hubungan kerja yang terjalin pada instansi tersebut sangat baik. Sedangkan aspek yang tinggi yaitu komitmen terhadap kompensi, lingkungan kerja yang kondusif, prosedur pembinaan SDM, dan aparat pengawas intern yang masih harus lebih ditingkatkan lagi.

4.3.3 Penilaian Risiko (X2) Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah (Y).

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa sub variabel Penilaian Risiko (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga yang menyatakan “Penilaian Risiko (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango” dapat diterima.

Koefisien sub variabel Penilaian Risiko (X2) menunjukkan arah yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal ini mengandung pengertian bahwa apabila Penilaian Risiko pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango semakin ditingkatkan maka pada dasarnya akan berpengaruh terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan di mana Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah memperhatikan aspek penilaian risiko dalam meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kantor tersebut.

SPIP-Penilaian Risiko dimaksudkan untuk pelaksanaan identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko dari suatu pemerintah daerah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP no 60 tahun 2008 tentang SPIP menyatakan bahwa pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang meliputi aspek identifikasi terhadap risiko atas salah saji laporan

keuangan, melakukan analisis terhadap risiko dengan metode, menganalisis dampak risiko, dan prinsip kehati-hatian dalam tingkat risiko.

Berdasarkan hasil pengujian analisis deskriptif tanggapan dari responden menunjukkan secara rata-rata memberikan tanggapan untuk sub variabel penilaian risiko yang dilakukan oleh Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk dalam kategori Sangat tinggi dan tinggi. Hasil ini terlihat dari tanggapan responden tentang apakah instansi tersebut melakukan analisis penilaian risiko atas salah saji laporan keuangan maka responden memberikan tanggapan sangat tinggi atau mereka sangat setuju.

Selanjutnya tanggapan terhadap Item kuesioner no 2 tentang apakah penilaian risiko yg dilakukan menggunakan metodologi atau mekanisme yg sesuai untuk mengenali faktor risiko maka sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju dan masih terdapat responden yang menjawab ragu-ragu. Selanjutnya item kuesioner no 3 tentang apakah pimpinan melakukan analisis risiko untuk menentukan dampak dari risiko yg telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan tersebut maka sebagian besar jawaban responden setuju dan terdapat 2 orang responden yang menjawab ragu-ragu. Selanjutnya item kuesioner no 4 tentang apakah Pimpinan instansi saya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima maka sebagian besar responden menjawab setuju.

4.3.4 Kegiatan Pengendalian (X3) Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukan bahwa sub variabel Kegiatan Pengendalian (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keempat yang menyatakan “Kegiatan Pengendalian (X3) Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango“ dapat diterima.

Koefisien sub variabel Kegiatan Pengendalian (X3) menunjukkan arah yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebesar 40,04%. Hasil ini mengandung pengertian bahwa apabila Kegiatan Pengendalian (X3) semakin ditingkatkan maka pada dasarnya akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebesar 40,04%. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan di mana Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah memperhatikan aspek kegiatan pengendalian dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah di Kantor tersebut.

Kegiatan pengendalian merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan SPIP karena aspek ini menjelaskan gambaran umum tentang aktivitas pengendalian untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat telah berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas pengendalian juga membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Pimpinan dan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas yang terdiri atas : ukuran sifat dari tugas fungsi masing-masing, pelaksanaan SPIP secara tertulis, evaluasi, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, fisik aset, kinerja,

pemisahan fungsi dan otorisasi, pencatatan akurat dan tepat waktu, pembatasan akses, pertanggungjawaban dan dokumentasi bukti transaksi.

Pelaksanaan SPIP-Kegiatan Pengendalian dalam rangka peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat pada tanggapan responden dengan kategori tinggi dan sangat tinggi atau rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan yang disampaikan. Mereka menyatakan bahwa penerapan SPIP dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango telah memenuhi unsur-unsur yang diamanahkan dalam peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 tentang pelaksanaan SPIP. Aspek yang sangat tinggi dalam pelaksanaan SPIP-Lingkungan Pengendalian yaitu aspek pembinaan SDM. Sedangkan aspek lainnya tanggapan responden adalah tinggi yaitu ukuran sifat dari tugas fungsi masing-masing, pelaksanaan SPIP secara tertulis, evaluasi, pengendalian sistem informasi, fisik aset, kinerja, pemisahan fungsi dan otorisasi, pencatatan akurat dan tepat waktu, pembatasan akses, pertanggungjawaban dan dokumentasi bukti transaksi.

4.3.5 Informasi Dan Komunikasi (X4) Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah(Y)

Pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa sub variable Informasi Dan Komunikasi (X4) Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis kelima yang menyatakan “Informasi dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango” dapat diterima.

Koefisien sub variabel Informasi dan Komunikasi menunjukkan arah positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebesar 25,80%. Hasil ini mengandung pengertian bahwa apabila Informasi dan Komunikasi semakin ditingkatkan maka pada dasarnya akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil penelitian ini sesuai dengan fakta dilapangan dimana Informasi dan Komunikasi mendapat perhatian dari pihak pemerintah yang telah menerapkan sistem informasi secara online terhadap pengelolaan keuangan yang ada di setiap instansi pemerintah Kabupaten BoneBolango.

SPIP-Informasi Dan Komunikasi dimaksudkan untuk pelaksanaan identifikasi, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggungjawabmereka.Sistem informasi yang relevan berisi metode untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporakan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Berdasarkan PP no 60 tahun 2008 tentang SPIP menyatakan bahwa pimpinan instansi wajib melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi yang meliputi aspek identifikasi pencatatan komunikasi informasi yang tepat waktu, pencatatan komunikasi secara efektif, sarana komunikasi yang memadai, dan pengelolaan pengembangan sistem informasi.

Berdasarkan hasil pengujian analisis deskriptif tanggapan dari responden menunjukkan secara rata-rata memberikan tanggapan untuk sub variabel informasi dan

komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk dalam kategori Sangat tinggi dan tinggi. Hasil ini terlihat dari tanggapan responden tentang apakah pimpinan instansi bagian keuangan melakukan indentifikasi, pencatatan dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat? maka responden memberikan tanggapan sangat tinggi atau mereka sangat setuju.

Selanjutnya tanggapan terhadap Item kuesioner no 2 tentang apakah pelaksanaan identifikasi, pencatatan dan komunikasi informasi telah dilaksanakan secara efektif? maka sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju dan masih terdapat responden yang menjawab ragu-ragu. Selanjutnya item kuesioner no 3 tentang apakah di instansi tersebut telah menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi untuk menginformasikan laporan keuangan? tersebut maka sebagian besar jawaban responden setuju. Selanjutnya item kuesioner no 4 tentang apakah di instansi tersebut telah mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus? maka sebagian besar responden menjawab setuju.

4.3.6 Pemantauan (X5) Berpengaruh Positif Dan Signifikan terhadap Kualitas

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa sub variabel Pemantauan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keenam yang menyatakan “Pemantauan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango “ dapatditerima.

Koefisien sub variabel Pemantauan menunjukan arahyangpositifterhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebesar 15,30%. Hal ini mengandung pengertian bahwa apabila sub variabel Pemantauan semakin ditingkatkan maka pada dasarnya akan meningkatkan Kualitas Laporan Keaungan Pemerintah sebesar 15,30%.

SPIP-Pemantauan merupakan proses yang menentukan kualitas kinerja pengendlaian intern sepanjang waktu. Aspek ini meliputi desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini akan berlangsung secara terus menerus. Berdasarkan PP no 60 tahun 2008 tentang SPIP menyatakan bahwa pimpinan instansi wajib melakukan pemantauan yang meliputi aspek aktivitas pemantauan, pemantauan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tidak lanjut hasilpemeriksaan.

Berdasarkanhasil pengujian analisis deskriptif tanggapan dari responden menunjukan secara rata-rata memberikan tanggapan untuk subvariabelpemantauan yang dilakukan oleh Kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah KabupatenBoneBolango termasuk dalam kategori Sangat tinggi dan tinggi. Hasil ini terlihat dari tanggapan responden tentang apakah pimpinan di instansi tersebut melakukan aktivitas pemantauanuntuk menilai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan? maka responden memberikan tanggapan sangat tinggi atau mereka sangatsetuju.

Selanjutnya tanggapan terhadap Item kuesioner no 2 tentang apakah Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan (terusmenerus)? maka sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju dan masih terdapat responden yang menjawab ragu-ragu. Selanjutnya item kuesioner no 3 tentang apakah Instansi tersebut melakukan evaluasi secara terpisah dengan aparat SPIP atau pihak eksternal pemerintah? tersebut maka sebagian besar jawaban responden setuju, namun masih terdapat 3 orang responden menjawab ragu-ragu. Selanjutnya item kuesioner no 4 tentang apakah instansi tersebut melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara konkri terhadap rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya? maka sebagian besar responden menjawab sangat setuju.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi Dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 96,40%, dan sisanya 3,60% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti namun turut berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Maka berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Sub variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi Dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah masing-masing sebesar 21,70%, 15,10%, 40,40%, 25,80%, 15,30% dengan demikian hipotesis kedua, ketiga, kempat dan kelima yang diajukan diterima.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada Kantor Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango agar lebih meningkat lagi aspek penilaian risiko terutama pada aspek penilaian risiko yg dilakukan dengan menggunakan metodologi atau mekanisme yg sesuai untuk mengenali faktor risiko.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah jumlah populasi dan

sampel untuk menambah keakuratan hasil penelitian dan menggunakan variabel bebas lainnya yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seperti Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual, Akuntabilitas dan Transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes Sukrisno, 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik Edisi 4*. Salemba Empat.Jakarta.

Amarini Ninda (2018), Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.

Committee Of Sponsoring Organization of the Treadway Commission Internal Control. Intergrated Framework. 1994

Fandi Wijaya (2017), Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Lampung.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*. Badang Penerbit UNDIP Semarang.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)* Jakarta, Salemba Empat.

Mahmudi, 2011. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 3.2

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: YKPN.

Nugroho Tomi, 2012. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pelaksanaan*

Pengadaan Barang dan Jasa. Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Administrasi Jakarta Utara. Skripsi. Universitas Indonesia.

Permendagri No. 13 Tahun 2016 Tentang Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP, 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Riduwan, 2014. Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian. Alfabeta.

Situmorang, Et. al. 2016. Analisis Data Penelitian; Menggunakan Program SPSS, Terbitan Pertama. Medan: USUPress.

STAN, 2007. Sistem Pengendalian Internal. Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta Bandung

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55
Ayat4.

LAMPIRAN 1 : JADWAL PENELITIAN

JADWAL PENELITIAN

NO	KEGIATAN	LAMA KEGIATAN									
		SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
1	Tahap Perencanaan										
2	Observasi Awal Lokasi Penelitian										
3	Penyusunan Proposal Penelitian										
4	Pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian										
5	Revisi Proposal Penelitian										
6	Pengumpulan Data Penelitian/Penyebaran Kuisioner Penelitian										
7	Penyusunan hasil Penelitian										
8	Ujian Hasil Penelitian										

LAMPIRAN 2 : KUISIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/.....

Di.

Tempat.

Hal : **Permohonan Pengisian Kuesioner**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Universitas Ichsan Gorontalo dengan judul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pada Kantor Badan Keuangan Pendapatan Daerah Bone Bolango”**

Oleh Karena itu Saya Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi/menjawab daftar pertanyaan yang terlampir. Untuk lebih meyakinkan Bapak/Ibu perlu kami informasikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk tujuan pengembangan ilmu khususnya Akuntansi Pemerintahan dan sebagai syarat dalam penyelesaian studi pada Program Strata Satu (S-1) Universitas Ichsan Gorontalo. Semua data dan informasi yang diberikan akan dijamin **kerahasiaannya**.

Atas perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, Maret 2020

Hormat Saya

Sahrin Wadipolapa

E.11.16.054

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan Terakhir : SMA, D3, S-1, S-2, S-3
Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi, Manajemen, Komputer,
Lainnya
Lama Bekerja : 1-5 Tahun, 5-10 tahun, lebih dari 10 tahun

B. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Mohon diisi oleh Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan
 2. Berilah tanda cek list (✓) pada kolom yang tersedia dan dipilih sesuai keadaan yang sebenarnya dengan kriteria :

SS = Sangat Setuju, S = Setuju, N = Netral (ragu-ragu), TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju

3. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh sebab itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

1. Sistem Pengendalian Intern

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
	Lingkungan Pengendalian					
1.	Instansi tempat saya bekerja menegakkan integritas, aturan, dan nilai-nilai etika dalam pengelolaan keuangan?					
2.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan berkomitmen terhadap kompetensi ?					
3.	Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara kondusif dengan mempertimbangkan resiko ?					
4.	Pengelolaan keuangan di instansi saya memiliki struktur organisasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan ?					
5.	Pengelolaan keuangan memiliki sistem pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat ?					
6.	Instansi saya bekerja terdapat kebijakan dan prosedur penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan/rekrutmen SDM ?					
7.	Instansi saya bekerja memiliki aparat pengawasan intern yang efektif dalam pengelolaan keuangan ?					
8.	Bagian keuangan memiliki hubungan kerja yang baik dengan bagian lainnya dilingkungannya maupun instansi pemerintah terkait ?					
	Penilaian Risiko					
1.	Pimpinandi instansi saya melakukan penilaian risiko					

	atas kemungkinan salah saji laporan keuangan?				
2.	Penilaian risiko yg dilakukan menggunakan metodologi atau mekanisme yg sesuai untuk mengenali faktor risiko?				
3.	Pimpinan melakukan analisis risiko untuk menentukan dampak dari risiko yg telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan?				
4.	Pimpinan instansi saya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima ?				
Kegiatan Pengendalian					
1.	Pimpinan instansi saya menyelenggarakan SPIP sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi masing-masing?				
2.	Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan SPI pada bagian keuangan telah ditetapkan secara tertulis pada masing-masing unit ?				
3.	Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan SPI pada bagian keuangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ?				
4.	Pimpinan instansi saya melakukan evaluasi secara terukur untuk memastikan bahwa kegiatan SPIP bagian keuangan telah dilaksanakan sesuai mekanismenya ?				
5.	Instansi saya melakukan pembinaan terhadap SDM ?				
6.	Instansi saya melakukan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi?				
7.	Instansi saya melakukan pengendalian atas fisik aset?				
8.	Instansi saya melakukan pengendalian atas indikator dan ukuran kinerja?				
9.	Instansi saya melakukan pengendalian terhadap pemisahan fungsi dan otorisasi pada bagian keuangan?				
10.	Instansi saya melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas setiap transaksi secara kronologis?				
11.	Instansi saya melakukan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan keuangan terhadap pihak yang tidak berkepentingan?				
12.	Instansi saya secara rutin membuat laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) terhadap laporan keuangan dan pencatatannya secara berjenjang?				
13.	Bagian keuangan mendokumentasikan setiap bukti-bukti transaksi dengan baik?				
Informasi dan Komunikasi					
1.	Pimpinan instansi bagian keuangan melakukan identifikasi, pencatatan dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat?				
2.	Pelaksanaan identifikasi, pencatatan dan komunikasi informasi telah dilaksanakan secara efektif?				
3.	Di instansi saya telah menyediakan dan memanfaatkan				

	berbagai bentuk dan sarana komunikasi untuk menginformasikan laporan keuangan?				
4.	Di instansi saya telah mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus?				
	Pemantauan				
1.	Pimpinan di instansi saya melakukan aktivitas pemantauan untuk menilai ekstivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan?				
2.	Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan (terus menerus)?				
3.	Instansi saya melakukan evaluasi secara terpisah dengan aparat SPIP atau pihak eksternal pemerintah?				
4.	Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara konkret terhadap rekomendasi hasil audit dan review lainnya ?				

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
	Relevan					
1.	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi saya bekerja memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekspektasi di masa lalu?					
2.	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang?					
3.	Di Instansi saya bekerja menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu?					
4.	Instansi tempat saya menyajikan laporan keuangan secara lengkap?					
	Andal					
5.	Transaksi yang disajikan oleh instansi saya bekerja jatengambardenganjurnal dalam laporan keuangan?					
6.	Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga dapat diverifikasi (diuji) oleh pihak lain dan menunjukkan hasil yang konsisten?					
7.	Di instansi saya bekerja menyajikan informasi keuangan diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus?					
	Dapat Dibandingkan					
8.	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya?					
	Dapat Dipahami					
9.	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna?					

LAMPIRAN 3 : HASIL OLAH DATA SPSS

1. UJI VALIDITAS

a. Lingkungan Pengendalian

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.839**	.919**	,201	,325	,485	.592*	.511*	.831**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,455	,219	,057	,016	,043	,000
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X1.2	Pearson Correlation	.839**	1	.732**	,144	,451	.577*	.577*	.548*	.836**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,595	,080	,019	,019	,028	,000
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X1.3	Pearson Correlation	.919**	.732**	1	,176	,150	,423	.618*	,309	.726**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001		,515	,579	,103	,011	,245	,001
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X1.4	Pearson Correlation	,201	,144	,176	1	,383	,194	,471	,438	.531*
	Sig. (2-tailed)	,455	,595	,515		,143	,472	,066	,090	,034
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X1.5	Pearson Correlation	,325	,451	,150	,383	1	,355	,213	.524*	.623**
	Sig. (2-tailed)	,219	,080	,579	,143		,177	,428	,037	,010
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X1.6	Pearson Correlation	,485	.577*	,423	,194	,355	1	,333	.632**	.681**
	Sig. (2-tailed)	,057	,019	,103	,472	,177		,207	,009	,004
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X1.7	Pearson Correlation	.592*	.577*	.618*	,471	,213	,333	1	.632**	.751**
	Sig. (2-tailed)	,016	,019	,011	,066	,428	,207		,009	,001
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16

X1.8	Pearson Correlation	.511*	.548*	,309	,438	.524*	.632**	.632**	1	.802**
	Sig. (2-tailed)	,043	,028	,245	,090	,037	,009	,009		,000
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16
TOTAL	Pearson Correlation	.831**	.836**	.726**	.531*	.623**	.681**	.751**	.802**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,034	,010	,004	,001	,000	
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Penilaian Risiko (X2)

Correlations										
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL				
X2.1	Pearson Correlation	1	,099	,398	,322	.644**				
	Sig. (2-tailed)		,716	,126	,224	,007				
	N	16	16	16	16	16				
X2.2	Pearson Correlation	,099	1	,235	,322	.572*				
	Sig. (2-tailed)	,716		,381	,224	,021				
	N	16	16	16	16	16				
X2.3	Pearson Correlation	,398	,235	1	,377	.780**				
	Sig. (2-tailed)	,126	,381		,150	,000				
	N	16	16	16	16	16				
X2.4	Pearson Correlation	,322	,322	,377	1	.736**				
	Sig. (2-tailed)	,224	,224	,150		,001				
	N	16	16	16	16	16				
TOTAL	Pearson Correlation	.644**	.572*	.780**	.736**	1				
	Sig. (2-tailed)	,007	,021	,000	,001					
	N	16	16	16	16	16				

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Kegiatan Pengendalian (X3)

		Correlations													
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	X3.12	X3.13	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	,62 6**	,30 4	,73 8**	,07 9	,40 6	,38 0	,30 8	,51 1*	,064	,578 *	,371	,485	,721**
	Sig. (2-tailed)		,01 0	,25 2	,00 1	,77 2	,11 8	,14 7	,24 6	,04 3	,813	,019	,157	,057	,002
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X3.2	Pearson Correlation	,62 6**	1	0,0 00	,21 4	0,0 00	0,0 00	,42 9	,39 4	,20 4	0,00 0	,410	0,00 0	,258	,429
	Sig. (2-tailed)	,01 0		1,0 00	,42 5	1,0 00	1,0 00	,09 7	,13 1	,44 8	1,00 0	,114	1,00 0	,334	,097
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X3.3	Pearson Correlation	,30 4	0,0 00	1	,20 1	,49 9*	,92 0**	,20 1	,47 3	,85 1**	,235	,064	,371	,485	,699**
	Sig. (2-tailed)	,25 2	1,0 00		,45 5	,04 9	,00 0	,45 5	,06 5	,00 0	,380	,813	,157	,057	,003
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X3.4	Pearson Correlation	,73 8**	,21 4	,20 1	1	,17 6	,31 9	,44 8	,01 1	,43 8	,319	,671 **	,623 **	,415	,687**
	Sig. (2-tailed)	,00 1	,42 5	,45 5		,51 5	,22 8	,08 2	,96 9	,09 0	,228	,004	,010	,110	,003
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X3.5	Pearson Correlation	,07 9	0,0 00	,49 9*	,17 6	1	,40 1	,17 6	,13 7	,51 4*	,608 *	,194	,164	,683 **	,557*
	Sig. (2-tailed)	,77 2	1,0 00	,04 9	,51 5		,12 4	,51 5	,61 4	,04 2	,013	,472	,543	,004	,025
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X3.6	Pearson Correlation	,40 6	0,0 00	,92 0**	,31 9	,40 1	1	,14 3	,43 5	,92 1**	,158	,158	,329	,556 *	,718**
	Sig. (2-tailed)	,11 8	1,0 00	,00 0	,22 8	,12 4		,59 7	,09 2	,00 0	,559	,559	,214	,025	,002
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X3.7	Pearson Correlation	,38 0	,42 9	,20 1	,44 8	,17 6	,14 3	1	,51 8*	,26 3	,319	,143	,623 **	,194	,595*
	Sig. (2-tailed)	,14 7	,09 7	,45 5	,08 2	,51 5	,59 7		,04 0	,32 6	,228	,597	,010	,472	,015

	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X3.8	Pearson Correlation	,308	,394	,473	,011	,137	,435	,518*	1	,402	,273	,111	,269	,229	,573*
	Sig. (2-tailed)	,246	,131	,065	,969	,614	,092	,040		,122	,306	,682	,314	,394	,020
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X3.9	Pearson Correlation	,511*	,204	,851**	,438	,514*	,921**	,263	,402	1	,251	,251	,291	,632**	,810**
	Sig. (2-tailed)	,043	,448	,000	,090	,042	,000	,326	,122		,348	,348	,275	,009	,000
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X3.10	Pearson Correlation	,064	0,000	,235	,319	,608*	,158	,319	,273	,251	1	,158	,329	,344	,498*
	Sig. (2-tailed)	,813	1,000	,380	,228	,013	,559	,228	,306	,348		,559	,214	,191	,050
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X3.11	Pearson Correlation	,578*	,410	,064	,671**	,194	,158	,143	,111	,251	,158	1	,329	,344	,542*
	Sig. (2-tailed)	,019	,114	,813	,004	,472	,559	,597	,682	,348		,559	,214	,191	,030
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X3.12	Pearson Correlation	,371	0,000	,371	,623**	,164	,329	,623**	,269	,291	,329	,329	1	,031	,589*
	Sig. (2-tailed)	,157	1,000	,157	,010	,543	,214	,010	,314	,275	,214	,214		,910	,016
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
X3.13	Pearson Correlation	,485	,258	,485	,415	,683**	,556*	,194	,229	,632**	,344	,344	,031	1	,685**
	Sig. (2-tailed)	,057	,334	,057	,110	,004	,025	,472	,394	,009	,191	,191	,910		,003
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
TOTAL	Pearson Correlation	,721**	,429	,699**	,687**	,557*	,718**	,595*	,573*	,810**	,498*	,542*	,589*	,685**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,097	,003	,003	,025	,002	,015	,020	,000	,050	,030	,016	,003	
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d. Infromasi dan Komunikasi (X4)

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	TOTAL
X4.1	Pearson Correlation	1	-.256	-.040	.113	.414*
	Sig. (2-tailed)		.207	.846	.581	.035
	N	26	26	26	26	26
X4.2	Pearson Correlation	-.256	1	-.123	.046	.327
	Sig. (2-tailed)	.207		.548	.822	.103
	N	26	26	26	26	26
X4.3	Pearson Correlation	-.040	-.123	1	.351	.545**
	Sig. (2-tailed)	.846	.548		.079	.004
	N	26	26	26	26	26
X4.4	Pearson Correlation	.113	.046	.351	1	.756**
	Sig. (2-tailed)	.581	.822	.079		.000
	N	26	26	26	26	26
TOTAL	Pearson Correlation	.414*	.327	.545**	.756**	1
	Sig. (2-tailed)	.035	.103	.004	.000	
	N	26	26	26	26	26

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

e. Pemantauan (X5)

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	TOTAL
X5.1	Pearson Correlation	1	.378	.358	.630**	.824**
	Sig. (2-tailed)		.149	.174	.009	.000
	N	16	16	16	16	16
X5.2	Pearson Correlation	.378	1	.000	.750**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.149		1.000	.001	.001
	N	16	16	16	16	16
X5.3	Pearson Correlation	.358	.000	1	.000	.465
	Sig. (2-tailed)	.174	1.000		1.000	.070
	N	16	16	16	16	16
X5.4	Pearson Correlation	.630**	.750**	.000	1	.834**
	Sig. (2-tailed)	.009	.001	1.000		.000
	N	16	16	16	16	16
TOTAL	Pearson Correlation	.824**	.746**	.465	.834**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.070	.000	
	N	16	16	16	16	16

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

f. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	,164	.618*	-,163	,098	.630**	,056	-,016	,126	.528*
	Sig. (2-tailed)		,543	,011	,547	,719	,009	,836	,953	,642	,035
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Y.2	Pearson Correlation	,164	1	,214	-,031	,460	,119	,690**	-,075	,119	,585*
	Sig. (2-tailed)	,543		,425	,910	,073	,662	,003	,783	,662	,017
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Y.3	Pearson Correlation	,618*	,214	1	-,067	,200	,516*	,115	-,163	,516*	,619*
	Sig. (2-tailed)	,011	,425		,806	,458	,041	,670	,547	,041	,011
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Y.4	Pearson Correlation	-,163	-,031	-,067	1	-,067	0,000	,346	,878**	,258	,456
	Sig. (2-tailed)	,547	,910	,806		,806	1,000	,189	,000	,334	,076
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Y.5	Pearson Correlation	,098	,460	,200	-,067	1	,258	,115	-,163	0,000	,402
	Sig. (2-tailed)	,719	,073	,458	,806		,334	,670	,547	1,000	,123
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Y.6	Pearson Correlation	,630**	,119	,516*	0,000	,258	1	-,224	,126	,250	,554*
	Sig. (2-tailed)	,009	,662	,041	1,000	,334		,405	,642	,350	,026
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Y.7	Pearson Correlation	,056	,690**	,115	,346	,115	-,224	1	,282	,224	,578*
	Sig. (2-tailed)	,836	,003	,670	,189	,670	,405		,290	,405	,019
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Y.8	Pearson Correlation	-,016	-,075	-,163	,878**	-,163	,126	,282	1	,126	,422
	Sig. (2-tailed)	,953	,783	,547	,000	,547	,642	,290		,642	,104
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Y.9	Pearson Correlation	,126	,119	,516*	,258	0,000	,250	,224	,126	1	,554*
	Sig. (2-tailed)	,642	,662	,041	,334	1,000	,350	,405	,642		,026
	N	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
TOTAL	Pearson Correlation	,528*	,585*	,619*	,456	,402	,554*	,578*	,422	,554*	1
	Sig. (2-tailed)	,035	,017	,011	,076	,123	,026	,019	,104	,026	

N	16	16	16	16	16	16	16	16	16
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. UJI REALIBILITAS

a. Lingkungan Pengendalian (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.917	3

b. Penilaian Resiko (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.856	3

c. Kegiatan Pengendalian (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.921	3

d. Informasi dan Komunikasi (X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.767	3

e. Pemantauan (X5)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.842	3

f. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.842	3

6.5 UJI HIPOTESIS

1. UJI STATISTIK F (*Simultan*)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	223.812	5	44.762	107.971	.000 ^a
	Residual	8.292	20	.415		
	Total	232.103	25			

a. Predictors: (Constant), x5, x1, x4, x2, x3

b. Dependent Variable: y

2. UJI STATISTIK T (*Parsial*)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.582	1.203		-2.146	.044		
	x1	.263	.072	.217	3.654	.002	.504	1.983
	x2	.316	.140	.151	2.249	.036	.397	2.520
	x3	.356	.062	.404	5.788	.000	.366	2.733
	x4	.467	.114	.258	4.114	.001	.456	2.195
	x5	.296	.134	.153	2.212	.039	.372	2.687

a. Dependent Variable: y



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1903/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2019

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

di,-

KABUPATEN BONE BOLANGO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

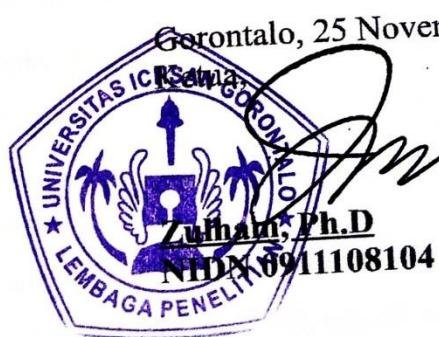
Nama	:	Zulham, Ph.D
NIDN	:	0911108104
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Sahrin Wadipolapa
NIM	:	E1116054
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi
Program Studi	:	Akuntansi
Lokasi Penelitian	:	BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
Judul Penelitian	:	PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPI) TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 25 November 2019



**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**
Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Telp. (0435)8591815
Website : <http://perizinan.bonebolangokab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 503/DPMPTSPNAKER-BB/IPM/0268/XI/2019

GRATIS

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Surat Keterangan Penelitian.
- : 2. Peraturan Bupati Bone Bolango 33 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelayang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- : Protokol/Proposal Penelitian dari Mahasiswa tersebut secara lengkap.
- : Surat Permohonan Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo Nomor 1903/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2019 Tanggal 23 November 2019 perihal Permohonan Izin Penelitian

MENERANGKAN

Nim : SAHRIN WADIPOLAPA
Nim Peneliti : JL. - KEL./DESA TULABOLO KECAMATAN SUWAWA TIMUR KAB./KOTA. BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO
Penelitian : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Penelitian : Untuk Penyusunan Skripsi

Penelitian : Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Penelitian : Sejak Tanggal Ditetapkan

Penelitian : Akuntansi

Penelitian : Baru

Pengjawab : Dr. Rahmisyari, ST., SE

Peneliti : 1. -

4. -

2. -

5. -

3. -

6. -

Lembaga : Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo

Apinya rencana penelitian yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bersangkutan disetujui untuk melanjutkan penelitian dengan ketentuan ;

Lingkup dan Lokasi Penelitian yang bersangkutan bedasarkan pada kerangka kerja/proposal/protokol yang harus menyampaikan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja setelah selesai melakukan penelitian. Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan 28 November 2020 dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali yang bersangkutan belum selesai melakukan penelitian.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam melakukan

Tilongkabila, 28 November 2019



JUMAIDI, AP, S.Sos, Mec. Dev
Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Pusat Pemerintahan No. 002 Jl. Bahrudin Jusuf Habibie Kecamatan Suwawa - 96184

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/BKPD-BB/ 99/VIII/2020

ng bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUSNI BOLILIO, S.Sos
 NIP : 19630702 198602 1 003
 Pangkat, Gol/Ruang : Pembina Tkt I, IV/b
 Jabatan : Kepala Badan

Dengan ini memberikan Surat Keterangan kepada :

Nama : SAHRIN WADIPOLAPA
 Nim : E1116054
 Jabatan/Tempat/Identitas : Peneliti/Badan Keuangan dan Pendapatan
 Daerah Kab. Bone Bolango/Desa Tulabolo
 Kec. Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian dengan
 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap
 Kualitas Laporan Keuangan

Demikian surat keterangan dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Suwawa, 12 Agustus 2020





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0356/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
 NIDN : 0906058301
 Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SAHRIN WADIPOLAPA
 NIM : E1116054
 Program Studi : Akuntansi (S1)
 Fakultas : Fakultas Ekonomi
 Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Juli 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Skripsi_SAHRIN WADIPOLAPA_E.11.16.054_PENGARUH
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	www.bkpd.bonebolangokab.go.id Internet Source	5%
2	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	2%
3	lib.ui.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	2%
6	jurnal.unpand.ac.id Internet Source	1%
7	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
8	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

CURRICULUM VITAE



1. Identitas Pribadi

Nama	: Sahrin Wadipolapa
NIM	: E.11.16.054
Tempat/Tgl Lahir	: Gorontalo, 16-11-1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Angkatan	: 2016
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur. Kab Bone Bolango

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan belajar di SD Negeri 2 Suwawa Timur, Pada Tahun 2010
2. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMP Negeri 1 Suwawa Timur pada Tahun 2013
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMK Negeri 1 Gorontalo pada Tahun 2016
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, mengambil Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Pada Tahun 2020